



# **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL RENJA) TAHUN 2024**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO  
JL. RA BASUNI NO 4 MOJOKERTO

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	43
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan .....	70
2.4. Review Terhadap RKPD .....	71
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	86
Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	87
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	87
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	87
3.3. Program dan Kegiatan.....	90
Bab IV. Rencanan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	110
Bab V. Penutup .....	128

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berfokus pada Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana sesuai dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah *Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dan memperhatikan Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 (2021-2025)* pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 yaitu : *Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab melalui percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia.* Maka, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan Rancangan Tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah: *“Mempercepat Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM*

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Awal Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dari mengacu pada dokumen perencanaan lainnya yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, rancangan awal RKPD, dan evaluasi Renja Tahun yang lalu. Hal bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

## **1.2. Landasan Hukum**

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6)

14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud**

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dari Dinas Kesehatan dalam pembangunan daerah

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen

RKPD dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

2. Untuk pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.5. Latar belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.7. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.8. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.10. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.5. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
- 3.6. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Bab V. Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu**

Evaluasi Rencana Kerja adalah bagian dari proses pengukuran keberhasilan dari suatu perangkat daerah. Pada tahap ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat dievaluasi sehingga perangkat daerah dapat menentukan kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah Rp. 234.982.668.833 dan realisasinya adalah Rp. 212.421.801.539 atau sekitar 90,40%. Realisasi lebih tinggi dari tahun 2021. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya sehingga realisasi keuangan belum bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dari realisasi anggaran tahun 2022, di penganggaran Dinas Kesehatan terdapat 76 sub kegiatan sedangkan puskesmas terdapat 3 kelompok penganggaran yaitu BOP Puskesmas, BLUD dan BOK Puskesmas. Dari 76 sub kegiatan di Dinas Kesehatan, yang realisasinya 100% ada 4 sub kegiatan, 59 sub kegiatan realisasi antara 80%-90% dan dibawah 80% ada 13 sub kegiatan. Sub Kegiatan yang realisasinya bisa mencapai 100% antara lain sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Sub kegiatan yang realisasi antara 80%-90% antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 89,85%
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96,19%
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 93,59%
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 88,89%
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 99,84
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91,61%
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92,60%

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 95,72%
9. Penyediaan Bahan/Material 99,99%
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu 96,67%
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84,08%
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 99,98%
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 95,25%
14. Pembangunan Puskesmas 85,73%
15. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 88,94%
16. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 93,26%
17. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 87,82%
18. Pengadaan Obat, Vaksin 90,32%
19. Pengadaan Bahan Habis Pakai 87,62%
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 93,97%
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 87,61%
22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 94,94%
23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 97,56%
24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 88,24%
25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 94,09%
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 84,93%
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 98,74%
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 96,09%
29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 96,51%
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 84,54%
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 98,98%
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 88,67%
33. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 94,75%
34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 97,06%

35. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 90,08%
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 87,34%
37. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 89,35%
38. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 93,35%
39. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 89,92%
40. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 98,04%
41. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 94,01%
42. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 96,71%
43. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 94,75%
44. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 87,26%
45. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 94,93%
46. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 99,84%
47. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 98,97%
48. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 99,50%
49. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 83,19%
50. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 89,91%
51. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 96,38%
52. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 94,00%
53. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 90,46%

54. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 88,36%
55. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 90,01%
56. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 74,71%
57. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 95,60%
58. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 91,15%
59. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 96,63%
- Realisasi kegiatan dibawah 80% antara lain :
1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74,08%
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73,91%
  3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 75,95%
  4. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 23,80%
  5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 59,47%
  6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 78,76%
  7. Operasional Pelayanan Puskesmas 79,58%
  8. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 43,25%
  9. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 75,78%
  10. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 77,00%
  11. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 71,58%
  12. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 13,33%

### 13. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 74,71%

Anggaran yang dikelola Puskesmas yaitu anggaran BLUD, BOK dan BOP Puskesmas realisasi diatas 90% dengan rincian BLUD Rp. 40.292.437.305 realisasi Rp. 38.699.297.848 (96,05%), BOK Puskesmas Rp. 25.567.915.891 realisasi Rp. 23.880.628.309 (93,40%), BOP Puskesmas Rp. 10.471.932.108 realisasi Rp. 10072540694 (96,19%).

Jika dilihat dari realisasi anggaran keseluruhan, capaian realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mencapai 90,40% yang meningkat dari tahun 2021. Meski demikian dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kendala yang dihadapi walaupun bisa diatasi oleh Dinas Kesehatan. Kendala tersebut antara lain :

1. Dana APBD : ada beberapa sub kegiatan yang penyusunan DPAnya masih ada komponen belanja yang tidak sesuai, sehingga harus dilakukan pergeseran maupun penyesuaian di PAPBD.
2. Dana APBN DAK Fisik : adanya penundaan pelaksanaan pengadaan barang untuk USG 2 D dan Antropometri. Setelah dilaksanakan konsultasi ke Kementerian Kesehatan, pengadaan untuk dua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan meskipun awalnya ada penundaan dari Pusat.
3. Dana APBN DAK Non Fisik BOK Puskesmas : adanya kendala pada sistem penatausahaan keuangan yang mana belum ada pelimpahan dari PA ke KPA. Sehingga ada hambatan puskesmas dalam proses realisasi anggaran. Selain kendala dari sistem penatausahaan keuangan, juga adanya kendala perubahan juknis DAK Non Fisik. Dimana untuk perubahan alokasi Covid-19 yang awalnya 25% dari pagu, diturunkan menjadi 5% dari pagu. Sisa anggaran dipergunakan 7,5% untuk Insentif UKM dan 12,5% dialihkan ke UKM esensial. Proses perubahan juknis ini berdampak pada perubahan RK/Berita Acara Kemenkes, dimana perubahan harus direviu APIP. Proses reviu ini memperlambat proses realisasi karena ada beberapa sub kegiatan yang harus melaksanakan pergeseran belanja.
4. Belum turunnya regulasi tentang Standar Akreditasi Puskesmas. Hal ini menyebabkan anggaran yang dialokasi untuk pelaksanaan kegiatan survei akreditasi tidak bisa dilaksanakan. Karena standar akreditasi puskesmas belum ada. Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah

- workshop pemahaman elemen penilaian dan studi banding ke puskesmas yang sudah re-akreditasi dengan hasil paripurna.
5. Adanya SiLPA di beberapa sub kegiatan, dikarenakan adanya sisa pengadaan dimana harga satuan di DPA lebih tinggi dari harga e katalog. Selain adanya pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti perjalanan dinas.

Dan berikut gambaran Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan (Terlampir)

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 KAB. MOJOKERTO (TC 29)

## DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	<b>Nilai RB</b>									
	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	86,37	86,18	84,77	87,18	104%	85,57 (A)	85,57 (A)	99%
	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.1 Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik</b>	88%	80%	80%	88%	110%	82%	88%	100%
	<b>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>1.1 Jumlah dok yang disusun</b>	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	86%
		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>						2 dok		

	<b>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.1 Jumlah dok laporan kinerja dinas kesehatan</b>	35 dok	3 dok	9 dokumen	9 dokumen (Renja, Renja Perubahan, LPPD, LKPJ, LKJIP, SAKIP, PMPRB, Lap Renja 3 triwulan)	100%	9 dokumen	9 dokumen	60%
		<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						9 dokumen		
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.1 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah</b>	92	87	88	90,4	102,27%	90,4	90,4	98%
	<b>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.1 Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN</b>	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	42 bulan	60%
		<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>						775 orang		
	<b>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Puskesmas)</b>	<b>2.2 Ketersediaan jasa pelayanan sarana</b>	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	42 bulan	70%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1 dokumen		
	<b>3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(dinkes)</b>	<b>2.1 Jumlah penyediaan Gaji tenaga K2</b>	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
		<b>2.2 Ketersediaan biaya operasional dinas kesehatan</b>	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan		12 bulan	36 bulan	60%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>						1 dokumen		

	<b>3.Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.1Persentase penyediaan sarana dan parasarana administrasi kepegawaian</b>			70%	88,89%	125,71%	72%	88,90%	0%
	<b>1.Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Kelengkapannya</b>	0	0	3392 mtr,582 stel	2364	59,49%	0	2364	0%
	<b>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.1Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	92	87	88%	86,08	86,08%	89%	86,08%	93%
	<b>1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>4.1 Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>						1 paket		
	<b>2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>4.1 jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>						1 Paket		
	<b>3. Penyediaan bahan logistik kantor</b>	<b>4.1 Jumlah makanan dan minuman yang disediakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>						1 Paket		
	<b>4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>4.1 Jumlah buku perundang undangan yang diadakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</b>						1 Paket		

	<b>5. Peyediaan bahan/material</b>	<b>4.1 Jumlah ATK yang diadakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan</b>						1 Paket		
	<b>6. Fasilitas kunjungan tamu</b>	<b>4.1 jumlah makan dan minum tamu yang disediakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</b>						1 Paket		
	<b>7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	<b>4.1 Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>						1 laporan		
	<b>8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD</b>	<b>4.1 Jumlah penata usahaan arsip</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>						1 dokumen		
	<b>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>5.1Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	92%	87%	88%	73,91%	82,95%	89%	89%	97%
	<b>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>5.1 Ketersediaan pembiayaan komunikasi,SDA, listrik</b>	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>						1 laporan		

	<b>6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>6.1 persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	92%	87%	88%	92%	100%	89%	89%	97%
	<b>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>6.1 Jumlah kendaraan yang dipelihara</b>	75 unit	15 unit	15 unit	10 kendaraan	66,67%	15 unit	45 unit	60%
		<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>						15 unit		
	<b>7. Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>7.1 Persentase puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap</b>	95%	89%	90%	95%	100%	95%	95%	100%
	<b>1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	<b>7.1 Ketersediaan jasa pelayanan, sarana prasarana dan operasional</b>	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
	<b>IKM Bidang Kesehatan</b>		<b>83,46</b>		80,46	84,49	100%	85,49	85,49	102%
	<b>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.1 AKI</b>	110/100.000 KH	-	114/100.000 KH	49.94/100.000 KH (8/16019*100000)		48,94/100.000 KH	48,94/100.000 KH	
		<b>1.2AKB</b>	4,1/1.000 KH		4,5 / 1.000 KH	4,43/1000 KH (71/16.019*1000)	98%	4.4/100,000 KH	4.4/100,000 KH	

		<b>1.3 Persentase Stunting</b>	15%		23%	3,80%	20%	2,00%	2,00%	
		<b>1.4 Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna</b>	100%(27 Pusk, 2 RS)		11,8 %(5 pusk, 2 RS)	5,08% (1 puskesmas Watukenongo. 2 RS)	45%	34.00% (10 puskesmas)	34.00% (10 puskesmas)	
		<b>1.5 Persentase KLB yang ditangani</b>	31 %(94 desa)		64 % (194 desa)	98,36 % (299 desa)	100%	56.00% (169 desa)	56.00% (169 desa)	
		<b>1.6 Persentase ODF</b>	100%		70%	304 desa odf (100%)	100%	100%	100%	
		<b>1.7 penghargaan swastisaba( kabupaten sehat)</b>	swastisaba wistara		swastisaba padapa	tidak mengajukan tahun ini nanti tahun depan 2023	0%	swastisaba padapa	swastisaba padapa	
		<b>1.8 Persentase kunjungan masyarakat kefasilitas kesehatan : rawat jalan dan rawat inap</b>	66,5% dan 6,7 %		61,5% dan 6,3 %	1.461.758 RJ ( 99,65) 5073 RI ( 0,35%)	100%	99,65% dan 6,40%	99,65% dan 6,40%	
		<b>1.9 Persentase indikator SPM yang mencapai target</b>	100% ( 12 indikator )		75%( 9 Indikator)	89,22 %(10 Indikator)	100%	83,3%(10 indikator)	83,3%(10 indikator)	
		<b>1.10 Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar</b>	93%		90%	99% (1072/1080*100)	100%	99,2%	99,2%	
		<b>1.11 persentase ketersediaan alkes sesuai standar</b>	93%		90%	90%	100%	90%	90%	

	<b>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.1 Jumlah gedung yang direhab</b>	27	2	5 puskesmas (Ngoro, Dawar, Bangsal, Trawas, Trowulan)	5 puskesmas (Ngoro, Dawar, Bangsal, Trawas, Trowulan)	100%	5 puskesmas	12 puskesmas	44%
		<b>1.2 Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik</b>	55 pustu	20 pustu	33 pustu	33 pustu	100%	2 gedung pustu	53 gedung pustu	96%
		<b>1.3 Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik</b>	24 sarana	0	24 sarana	329 kit antropometri, 5 ambulans	100%	26 sarana	358 sarana	100%
		<b>1.4 jumlah pengadaan alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan</b>	46 paket	1 paket	14 paket	Posbindu KIT 77 paket, USG 2 D 2 unit, Alkes Pustu 20 Paket, Alkes pendukung UKS 615 paket	100%	4 paket	82 paket	100%
		<b>1.5 jumlah pengadaan obat ,vaksin</b>	45paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	9%
		<b>1.6 jumlah pengadaan bahan habis pakai</b>	30 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	5 paket	9 paket	30%
		<b>1.7 jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan</b>	35 paket	0	7 paket	1 paket	14%	7 paket	7 paket	23%

	<b>1. Pembangunan puskesmas</b>	<b>1.1 Jumlah puskesmas yang di bangun</b>	5	2	3	1 Pusk(pusk Bangsal)	33,00%	1 pusk	4 pusk	80%
	<b>2.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</b>	<b>1.1 Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</b>	55 pustu	20 pustu	4 Pusk dan33 pustu	4 pusk 33 pustu	100%	2 puskesmas, 2	6 puskesmas, 55 pustu	100%
	<b>3. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>1.1 Jumlah antropometri kit yang diadakan</b>	2009	270	329 kit	329 kit	100%	958 unit antropometri	1557 sarana natro	78%
		<b>1.2 Jumlah ambulance diadakan</b>			5 ambulance	5 ambulance		0	0	
	<b>4.Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>1.1 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan( DID)</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket(pospindu kit 77 paket)	100%	1 paket (iva kit, vaccin refrigerator, sanitarian kit, hematology analizer)	98 paket	100%
		<b>1.2 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan( P APBD)</b>			20 pustu/pusk	20 pustu/paket				
		<b>1.3 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan( DAK)</b>			1 paket	1 paket(usg 2 unit)				
	<b>5. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi</b>	<b>1.1 Jumlah alat yang dikalibrasi</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	60%
	<b>6. Pengadaan obat,vaksin</b>	<b>1.1 Jumlah ketersediaan penunjang DAK</b>	60 bulan	12 keg	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
		<b>1.2 Jumlah obat yang diadakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket	3 paket	60%

	<b>7. Pengadaan bahan habis pakai</b>	<b>1.1 Jumlah bahan habis pakai yang diadakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
	<b>8. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	<b>1.1 Jumlah kegiatan distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	60 bulan	12 bulan	120 puskesmas/12 bulan	120 kali/12 bulan	100%	12 kali	36 bulan	60%
	<b>2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.1 Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target</b>	150	30 layanan	29 layanan	32 layanan	100%	30 layanan	30 layanan	61%
	<b>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	<b>2.1 Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	89.665 bumil	17.633 bumil	17.621 bumil	15.284	86,67%	18,450 ibu hamil	51.367 ibu hamil	57%
		<b>2.2 jumlah giat audit perinatal</b>	20 kali	4 kali	4 kali	0	-			
		<b>2.3 jumlah kegiatan monev</b>	25 kali	5 kali	6 kali	6 kali	100%			
		<b>jumlah kegiatan pelacakan kasus</b>	40 kali	20 kali	25 kali	25 kali	100%			
		<b>jumlah supervisi fasilitatif</b>	120 kali	30 kali	40 kali	14 kali	35%			
	<b>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>	<b>2.1 Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	85.660 bulin	16.832 bulin	16.820 bulin	14663 bulin	87,18%	17.558 bulin	49.053	57%

	<b>3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>	<b>2.1 Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	81.650 bayi	16.030 bayi	16.019 bayi	14896 bayi	92,98%	16.902 bayi	47.828	59%
		<b>Jumlah kegiatan monev</b>	25 kali	5 kali	6 kali	6 kali	100%			
		<b>jumlah kegiatan pelacakan</b>	100 kali	20 kali	25 kali	25 kali	100%			
		<b>Jumlah kegiatan supervisi</b>	150 kali	30 kali	40 kali	40 kali	100%			
		<b>Jumlah sosialisasi</b>	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%			
	<b>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</b>	<b>2.1 Jumlah balita yang mendapat pelayanan</b>	329.910 balita	65.682 balita	65.651 balita	58834 balita	89,62%	66752 balita	191.268	58%
		<b>Jumlah kegiatan monev</b>	125 kali	25 kali	30 kali	30 kali	100%			
		<b>Jumlah kegiatan sosialisasi ke nakes</b>	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%			
		<b>jumlah sosialisasi peningkatan kapasitas bidan</b>	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%			
	<b>5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>	<b>2.1 Jumlah siswa kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat layanan kesehatan</b>	141904	33726	31372 orang	31372 orang	100%	39.400 orang	104.498	74%
		<b>2.2 Jumlah Siswa yang Mengikuti Workshop</b>	540 siswa	108 siswa	108 siswa	108 siswa	100%			
	<b>6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>	<b>2.1 Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan</b>	3751020	749.204	747.766 orang	716625 orang	95,83%	106.000 orang	896.829	2391%
	<b>7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>	<b>2.1 Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	656280	129.770	153.276 orang	153276 orang	100%	152.500 orang	435.546	66%

	<b>8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	<b>2.1 Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	1745475	765.034	345.095 orang	201294	58,33%	79.776 orang	1.043.014	60%
		<b>2.2 Jumlah posbindu yang terbentuk</b>	1480	296	304 posbindu	304 posbindu	100%	304 posbindu	904	61%
	<b>9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>	<b>2.1 Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	113045	26888	18609 orang	18609 orang	100%	46.700 orang	92.197	82%
	<b>10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</b>	<b>2.1 Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	8685	1613	1537	1408	91,61%	2.311 orang	5.332	61%
	<b>11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>	<b>2.1 Jumlah Penderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	60000	13555	11600	11600	100%	2.713 orang	27.868	46%
	<b>12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</b>	<b>2.1 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan</b>	175.820 orang	33664	20772	14419	69,42%	12.502 orang	60.585	34%
		<b>2.2 Jumlah penyediaan biaya penunjang utk operasional KPA</b>	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%

	<b>13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</b>	<b>Jumlah pembiayaan tracer</b>	1.520 desa	304 desa	304 desa	304 desa	100%	0	912	60%
		<b>Jumlah Petugas Surveilens</b>		27		27 puskesmas	100%	0	0	
		<b>Jumlah pemantauan isolasi</b>		12213				0	0	
		<b>Jumlah Pelacakan dan Pemantauan</b>		20502		625 bok	100%	0	0	
		<b>Jumlah pengiriman spesimen</b>		15740				0	0	
		<b>Jumlah pembelian APD</b>		masker 2688 box, sarung tangan 672 box, handsanitizer 672 buah				0	0	
		<b>Jumlah transport petugas tracing dinas</b>		52493				0	0	
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</b>						1 dokumen lap	1 dokumen lap	

	<b>14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar</b>				1 dok	1 dok	100%		
	<b>15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	<b>2.1 Jumlah balita gizi buruk yang ditangani</b>	450	100 balita	100	66 balita	100%	90 balita	256	57%
		<b>2.2 Jumlah Kegiatan Evaluasi Perencanaan Gizi</b>	30 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	18 kali	50%
		<b>2.3 Jumlah Kader yang Mengikuti Pelatihan Emodemo dan PMBA</b>	1520 kader	304 kader	135 kader	135 kader	100%	135 kader	574	38%
		<b>2.4 Pengadaan Susu Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil</b>	5 paket	1 paket	2 paket	2 paket( susu balita ,susu bumil)	100%	2 paket( susu balita ,susu bumil)	5	100%
		<b>2.5 Pelatihan Pojok Gisi</b>	55 Pustu	55 Pustu	55 Pustu	55 Pustu	100%	0	0	0%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar</b>	0	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	

	<b>16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>	<b>2.1 Jumlah guru OR dan UKS yang dibina</b>	150 guru	30 guru	30 guru	54 guru	180%			
		<b>2.2 Jumlah Pos UKK yang dibina</b>	115 pos	23 pos	23 pos	23 pos	100%	27 pos	73	63%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>	0	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	
	<b>17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>2.1 Jumlah depot air minum yang diperiksa</b>	450 depot	90 depot	90 depot	93 depot	103%	90 depot	273	61%
		<b>2.2 Jumlah sampel air minum yang diperiksa</b>	350 sampel	70 sampel	70 sampel	73 sampel	104%	70 sampel	213	61%
		<b>2.3 Jumlah Kegiatan Studi Ehra</b>	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	60%
		<b>2.4 Jumlah Pembentukan Pos UKK</b>	5 pos	1 pos	1 pos	2 pos	200%	1 pos	4 pos	80%
		<b>2.5 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</b>			342.148 KK	360.624 KK	105%	342.148 KK		
		<b>2.6 Jumlah Jamban yang dibangun</b>	150 unit	30 unit	16 unit(TMMD)	165 unit (DID)+16 unit TMMD	100%	16 unit(TMMD)		
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>	0	0	0	0	-	1 dokumen	1 dokumen	

	<b>18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</b>	<b>2.1 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan</b>	280 kelompok	56 kelompok	56 kelompok	54 kelompok	96,43%	0	110	39%
		<b>2.2 jumlah cetak banner</b>	8.960 m2	1792 m2	329 m2	329 m2	100%	0	2120	24%
		<b>2.3 jumlah leaflet yang diadakan</b>	15.500 lembar	3100 lembar	15.000 lembar	27.000 lembar	180%	0	30100	194%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</b>	<b>2.1 Jumlah layanan tradisional yang dibina</b>	135 puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	100%	27 puskesmas	81	60%
		<b>2.2 Jumlah Hatra (penyehat tradisional) pemegang STPT</b>	60 kali	12 kali	27 hatra	16 hatra	59,26%	27 Puskesmas	66	110%
		<b>2.3 Pembinaan Kader Asman Toga</b>	135 puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	100%	27 puskesmas	81 puskesmas	60%
		<b>2.4 jumlah Kader Asman Toga</b>			27 Asman	27 Asman	100%	27 Asman	81 asman	60%
		<b>2.5 Pengadaan Pohon Batra</b>	135 Paket	27 paket	27 paket	27 Paket	100%	27 Paket	81 puskesmas	60%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan</b>	<b>2.1 Jumlah kegiatan surveilans covid</b>	1200	240	240 kali	299 kali	125			
		<b>2.2 Jumlah kegiatan surveilans PD3I (Suspek Defteri)</b>			0	7 kasus				

		<b>2.3 Jumlah kehiatan pemeriksaan haji Jumlah kegiatan surveilens</b>			1 kali	1 kali	100%			
		<b>2.4 jumlah surveillance keputangan hajijumlah kegiatan pemeriksaan haji</b>	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%			
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</b>	<b>2.1 Jumlah sosialisasi Napza disekolah</b>	270 sekolah	54 sekolah	54 sekolah	74 sekolah	137%			
		<b>2.2 jumlah pondok yang mendapatkan sosialisasi NAPZA</b>	50 pondok	10 pondok	10 pondok	18 pondok	180%			
		<b>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</b>						500 orang	500 orang	
	<b>22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>2.1 Jumlah fogging fokus DBD</b>	1250	198 fokus	250 fokus	275 foukus	144,50%	260 fokus	733	59%
		<b>2.2 jumlah nakes ( pengelola program )yang ditingkatkan kemampuannya(dalam hal penanganan)</b>			27 nakes (PP)x5	135 nakes	100%			
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>						1 dokumen	1 dokumen	

	<b>23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>2.1 Jumlah PBID</b>	482.690 orang	96.538 orang	44.000 orang	141.977 orang	100%	141.977	380492	79%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>24. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</b>	<b>2.1 Jumlah kegiatan pengiriman spesimen</b>	1200	120	240 kegiatan	80 kali	33,33%	80 kali	280	23%
		<b>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang Didistribusikan</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>25. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</b>	<b>2.1 Jumlah tatanan yang harus diikuti</b>	25	5	5 tatanan	5 tatanan	100%			
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>26. Operasional Pelayanan Puskesmas</b>	<b>2.1 Jumlah ketersediaan anggaran penduduk program di puskesmas</b>	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
		<b>2.2 Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan makan minum pasien</b>	280.000 pasien	56.000 pasien	56.000 pasien	5073 pasien	9%	0	61073	22%
		<b>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</b>						1 dokumen	1 dokumen	

	<b>27. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	<b>2.1 jumlah ketersediaan anggaran untuk operasional labkesda</b>	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		<b>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>28. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota</b>	<b>2.1 Jumlah visitasi klinik</b>	50	10 klinik	10 klinik,5 lab	15 klinik,0 lab	100%	10 klinik	35	70%
		<b>2.2 jumlah kegiatan PAM lebaran, Natal dan Tahun Baru</b>	10	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6 keg	60%
		<b>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</b>						27 puskesmas	27 puskesmas	
	<b>29. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</b>	<b>2.1 Jumlah bayi yang mendapat IDL</b>	82330	16066	16019	17 004 bayi	105,80%	17.757	50645	62%
		<b>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</b>						1 laporan	1 laporan	
	<b>30. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</b>	<b>2.1 Jumlah kewaspadaan dini dan respon wabah</b>	60 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	36 kali	60%
		<b>2.jumlah peningkatan kapasitas</b>			4 kali	4 kali	100%			

		<b>2.2 Case finding kasus penyakit disekitar lokasi wabah</b>	500 kali	500 keg	100 kali	0				
		<b>2.3 surveillance terpadu</b>	120 kali		24 kali	0				
		<b>2.4 kegiatan pelacakan kasus</b>	1250 kali		12 kali	0				
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>31. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</b>	<b>2.1 Jumlah sarana SPGDT yang diadakan</b>	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
		<b>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</b>						1 PSC	1 PSC	
	<b>3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>3.1 Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik</b>	41	9	35	35	100%			
	<b>1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</b>	<b>3.1 jumlah data dan informasi yang dikelola</b>	25	5 data	5 data	5 data	100%	5 data	15 data	60%
		<b>Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola</b>						5 data	5 data	
	<b>2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>3.1 Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola</b>	16	4 portal	4 portal	4 portal	100%	4 portal	12 portal	75%

		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</b>	<b>3.1 Jumlah peralatan telemedicina yang diadakan</b>	0	0	26 paket	26 paket	100%	0	0	
	<b>4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.1 Jumlah rumah sakit yang difasilitasi perijinannya</b>	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	11 RS	33 RS	60%
	<b>1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya</b>	<b>4.1 jumlah pengendalian dan pengawasan izin operasional 11 RS</b>	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	11 RS	33 RS	60%
		<b>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</b>						11 RS	11 RS	
	<b>2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.1 Jumlah tata Kelola pelayanan 11 rumah sakit sesuai standar kemenkes</b>	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	11 RS	33 RS	60%

		<b>Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar</b>						11 RS	11 RS	
	<b>3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</b>	<b>4.1 Jumlah Mutu Pelayanan 11 rumah sakit sesuai standar kemenkes</b>	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	11 RS	33 RS	60%
		<b>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</b>						27 puskesmas	27 puskesmas	
	<b>4. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	<b>4.1 jumlah dokumen Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	10 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 Kebijakan	100%			
	<b>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>1.2 persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar</b>	90%	83%	75%	55%	73%	75%	55%	61%
	<b>1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.1 Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (medis dan paramedis)</b>	6125	1150	1500	2048	136,50%	1175	4373	71%
	<b>1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.1 jumlah tenaga kesehatan yang diberikan izin</b>	6125	1150	1500 SIP	2048 SIP	136,50%	1.175 ijin	4373	71%

		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.1 Jumlah pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada</b>	1220	244	267	254	95%			
	<b>1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</b>	<b>2.1 jumlah nakes yang direkrut</b>	210 nakes	42 nakes	55 nakes	52 nakes	94,55%	66 nakes	160	76%
		<b>2.2 jumlah perawat ponkesdes yang dibiayai</b>	1.055 orang	211 orang	211 orang	202 orng	95,73%	211	624	59%
		<b>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</b>						211 perawat, 2 dokter, 33 nakes (dokter umum 7, dokter gigi 4, gizi 8, analis 1, D3 farmasi 13)	211 perawat, 2 dokter, 33 nakes (dokter umum 7, dokter gigi 4, gizi 8, analis 1, D3 farmasi 13)	
	<b>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>	<b>1.3 Persentase apotik yang memenuhi standar kesehatan</b>	100	-						
		<b>apotik (96 apotik</b>	100%	15%	30%(28 apotek)	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	57%	57%
		<b>toko obat ( 2 toko obat )</b>	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		<b>umot ( 1 umot)</b>	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

		<b>PIRT ( 120 PIRT) 74 % dari 1900 PIRT</b>	100%	1300 (68%)	1420 PIRT (74%) 120 sertifikat	112 sertifikat	93%	1540 (81%)/120 sertifikat	1540	118%
		<b>persentase sarana toko alkes dan perusahaan rumah tangga,perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan</b>	100%	20%	20%( 3 PRT- PKRT)	26% (4 PRT- PKRT)	26%(4 PRT-PKRT)	20% (3 PRT- PKRT)	46%	46%
	<b>1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>1.1Jumlah pemberian izin apotik,toko obat,toko alkes dan usaha mikro obat tradisional</b>	243	45	30%(28 apotek)	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	155	64%
	<b>1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>1.1 Jumlah apotek,toko obat,toko alkes dan umot yang diawasi</b>	81	15	20 apotek	35 apotek	175%	55 apotek	105	130%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>						1 dokumen	1 dokumen	

	<b>2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>1.1 Jumlah perijinan yang diberikan pada apoti,toko obat dan toko alkes dan UMOT</b>	81	15	20 apotek	20 apotek	100%	20 apotek	60 apotek	74%
		<b>Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>						55 apotek	55 apotek	
	<b>3. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>1.1 Jumlah kegiatan pembinaan apotek,toko obat,toko alkes dan umot</b>	81	15	20 kegiatan	20 kegiatan	100%			
		<b>Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen apotik</b>						55 apotek	55 apotek	

	<b>2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	<b>2.1 Jumlah pengendalian dan pengawasan</b>	15	3	10 sarana	17 sarana	170%		
	<b>1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	<b>2.1 Jumlah pengendalian dan pengawasan</b>	15	3	10 sarana	17 sarana	170%	10 sarana	
		<b>2.1 Jumlah PRT-PKRT yang dibina</b>			3 PRT-PKRT	4 PRT-PKRT	133.3%	3 PRT-PKRT	7 47%
		<b>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>						1 dokumen	1 dokumen

	<b>3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>3.1 Jumlah sertifikat yang dikeluarkan</b>								
			600	120	150	112	93,33%			
	<b>1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>3.1 Jumlah sertifikat yang dikeluarkan</b>	600	120	120 sertifikat	112 sertifikat	93,33%	120 sertifikat	360 sertifikat	60%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>						120 dok	120 dok	

	<b>4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>4.1 Jumlah jasa boga</b>	350	70	70	70	100%	70	210	60%
	<b>1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>4.1 Jumlah jasa boga</b>	350	70	70 jasa boga	70 jasa boga (29 sampel, 10 depot)	100%	70	210	60%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>						1 dokumen	1 dokumen	

	<b>5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>5.1 Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan</b>	600	120	140 sekolah, sarana	446 sekolah, sarana	100%	140 sekolah	566	94%
	<b>1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</b>	<b>5.1 Jumlah post market</b>	600	120	20 sekolah	20 sekolah	100%	20 sekolah	60 sekolah	50%
		<b>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</b>						20 sekolah	20 sekolah	
	<b>2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga</b>	<b>5.1 Jumlah pemeriksaan industri rumah tangga</b>	600	120 sarana	120 sarana	436 sarana	363,30%	120 sarana	676	113%
		<b>Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</b>						1 data	1 data	

	<b>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>1.4 Persentase rumah tangga perPHBS</b>	76%	-	72%	85%	118%	85%	85%	112%
	<b>1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.1 Jumlah kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan yang dilaksanakan</b>	35	6	6	3	50%	5 keg	14	40%
	<b>1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1.1 Jumlah kegiatan advokasi pemberdayaan dan kemitraan</b>	30	5 keg	5 keg	2(POSKESTRE N,KOIPU)	40%	5 keg	12 keg	40%
		<b>1.2 jumlah kampanye gebyar peringatan hari kesehatan</b>	5	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	60%
		<b>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.1 Jumlah kader SHB yang dilakukan pembinaan</b>	1350	270	270	270	100%	270	810	60%
	<b>1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</b>	<b>2.1 Jumlah kader yang diberikan promosi PHBS</b>	1350	270 kader	270 kader	270 kader	100%	270 kader	810 kader	60%
		<b>2.2 Jumlah desa yang diberikan promosi PHBS</b>	25 desa	5 desa	5 desa	304 desa	100%	304 desa	304 desa	100%

		<b>2.3Jumlah pondok pesantren yang dilakukan ke promosi PHBS</b>	25 ponkes	5 ponkes	5 ponkes	5 ponpes	100%	5 ponkes	15 ponkes	60%
		<b>2.4Jumlah posyandu yang diberikan promosi PHBS</b>	90 posyandu	18 posyandu	18 posyandu	18 posyandu	100%	18 posyandu	54	60%
		<b>2.5Jumlah sekolah yang dilakukan kegiatan promosi PHBS</b>	25 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	100%	5 sekolah	15 sekolah	60%
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</b>						1 dokumen	1 dokumen	
	<b>3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.1Jumlah desa siaga yang dibina dan dinaikkan staratanya</b>	30	6	27	27	100%	27	54	100%
	<b>1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	<b>3.1Jumlah puskesmas yang diberikan bimbingan pengembangan UKBM</b>	30 pusk/posyandu	27 pusk/posyandu	27 pusk/ posyandu	27 pusk/ posyandu	100%	27 pusk/ posyandu	54 posyandu	180%
		<b>3.2Jumlah desa siaga yang dibina dan naik stratanya</b>	135 pusk/desa	27 pusk/desa	27 pusk/ desa	27 pusk/desa	100%	27 pusk/desa	54 pusk/desa siaga	40%

		<b>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>						1 dokumen	1 dokumen	
--	--	---	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD**

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakan program dan kegiatan. Pengukuran dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah dilakukan.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bisa dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2022 (TC.30)**  
**Kabupaten Mojokerto**

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn N+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	AHH		v	72,63	72,73	72,83	72,93	72,59	72,93	72,83	72,93	Melebihi target
2	IKM		v	79,46	80,46	81,46	81,46	84,57	84,49	81,46	81,46	Melebihi target
3	AKI		v	115/100.000 KH (19 ibu)	114/100.000 KH	113/100.000 KH	112	417/100.000 KH	49,94/100.000 KH (8 ibu/16.019)	113/100.000 KH	112	Melebihi target
4	AKB		v	4,6/1.000 KH (76 bayi)	4,5/1.000 KH	4,4/100.000 KH	4,3	4,4/1.000 KH	4,43/1.000 KH (71 bayi/16.019)	4,4/100.000 KH	4,3	Melebihi target
5	Persentase Stunting		v	25%	23%	21.00%;	19%	25%	3,8	21.00%;	19%	Melebihi target
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (27 puskesmas, 9 RS, 23 klinik)		v	4% (1 Puskesmas)	11,8% (5 puskesmas, 2 RS)	34.00% (10 puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	0	5,08% (1 puskesmas Watukenongo.2 RS)	34.00% (10 puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	Tidak tercapai
7	Persentase Desa KLB		v	72% (219 desa)	64% (194 desa)	56.00% (169 desa)	47% (144 desa)	72% (219 desa)	98,36 (299 desa)	56.00% (169 desa)	47% (144 desa)	Tidak tercapai
8	Persentase ODF (desa ODF)		v	30,50%	70%	80%	80,50%	60%	100%	80%	80,50%	Melebihi target
9	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)		v	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiuwerda	swastisaba padapa	swastisaba padapa (tahun 2022 tidak ada kegiatan penilaian Kab Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba wiuwerda	Tidak terlaksanakan penilaian kab sehat karena masih pandemi
10	Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap		v	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	62.50% & 6,40%	63,5% dan 6,4%	61,5% dan 6,3%	99,65% (1.461.758) dan 0,35% (5073)	62.50% & 6,40%	63,5% dan 6,4%	Melebihi target utk r Jalan sedangkan r inap dibawah target
11	Persentase Indikator SPM yang mencapai target		v	66% (8 indikator)	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	66% (8 indikator)	83,3%(10 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	Melebihi target

12	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	v	90	90%	90%	91	90%	99,26	90%	91	Melebihi target
13	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	v	90	90%	90%	91	90%	90%	90%	91	Mencapai target
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	v	70%	75%	75%	85%	70%	55%	75%	85%	Tidak mencapai target
15	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan										
	- Apotik (96 apotek)	v	15%	30% (28 apotek)	45% (43 apotek)	60%	15%	57% (55 apotek)	45% (43 apotek)	60%	Melebihi target
	- Toko Obat (2 toko obat)	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai target
	- Umot (1 umot)	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai target
	- PIRT (1900 dalam 5 tahun)	v	1300 (68%)	1420 PIRT (74%)/120 sertifikat	1540 (81%)/120 sertifikat	1660(87%)	1300 (68%)	112 sertifikat	1540 (81%)/120 sertifikat	1660(87%)	Tidak mencapai target
15	Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	v	20%	20% (3 PRT-PKRT)	20% (3 PRT-PKRT)	20%	20%	26% (4 PRT-PKRT)	20% (3 PRT-PKRT)	20%	Mencapai target
16	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	v	71%	72%	73%	74%	72	85%	73%	74%	Melebihi target
17	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	v	80,90%	81,90%	82,90%	83,90%	80,9	98%	82,90%	83,90%	Melebihi target
18	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	v	80,00%	80%	82%	84%	80%	83%	82%	84%	Melebihi target
19	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	v	88%	88%	89%	90%	87%	90,40%	89%	90%	Melebihi target
20	Indeks Profesionalitas ASN	v	59	70	72	74	59	59,10	72	74	Tidak mencapai target
21	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	v	84,37	84,77	85,17	85,57	86,18	87,18	85,17	85,57	Melebihi target
22	Nilai RB Perangkat Daerah	v	84,37	83,99	85,17	85,57	79,18	74,77	85,17	85,57	Tidak mencapai target
23	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	v	0	3 inovasi (e farmasi, e presensi,	4 inovasi	5 inovasi	3 inovasi	6 Inovasi (E Farmasi, e Presensi,	4 inovasi	5 inovasi	Melebihi target

					permensimela)				permensimela, Caping Mas, Terpong Sakti, Sinergi)			
24	Pelayanan kesehatan ibu hamil	v		17.633	17.621	18.450	18.550	15.453	15.284	18.450	18.550	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
25	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	v		16.832	16.820	17.558	17.658	15.652	14.583	17.558	17.658	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
26	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	v		17.420	16.019	16.902	17.002	15.383	14.896	16.902	17.002	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
27	Pelayanan kesehatan balita	v		65.682	65.651	66.752	66.852	53.028	58.784	66.752	66.852	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
28	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kelas 1 dan Kelas 7	v		38.952	31.372	39.400	40.400	38.952	31.372	39.400	40.400	Mencapai target
29	Pelayanan kesehatan pada usia produktif ( Usia 15-59 tahun)	v		683.028	153.276	106.600	107.100	268.750	153.276	106.600	107.100	Mencapai target
30	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	v		147.089	747.766	152.500	153.000	139.005	716.652	152.500	153.000	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
31	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	v		229.541	345.095	79.776	81.776	156.348	179.597	79.776	81.776	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
32	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	v		61.844	18.609	46.700	48.700	58.419	18.609	46.700	48.700	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
33	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	v		1.583	1.537	2.311	2.511	1.507	1.420	2.311	2.511	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
34	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	v		13.555	11.600	2.713	2.913	12.916	11.600	2.713	2.913	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
35	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	v		33.664	20.772	12.502	13.002	28.050	13.557	12.502	13.002	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM

Dari 23 indikator kinerja utama (IKU) yang ada, 7 indikator tidak mencapai target, antara lain indikator :

1. Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (27 puskesmas, 9 RS, 23 klinik)
2. Persentase Desa KLB
3. Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)
4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan
5. Persentase penerbitan ijin PIRT
6. Indeks Profesionalitas ASN
7. Nilai RB Perangkat Daerah

Berikut gambaran capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 :

### **1. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2022 dapat dilihat dari data

Tabel 2.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2022

AHH	2020	2021	2022
Kabupaten Mojokerto	72.53	72.59	72.93

Dari data diatas, angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan. AHH merupakan gambaran suatu kondisi wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdasarkan atas perhitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya. Banyak hal yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya angka harapan hidup, antara lain : jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan (mempunyai penyakit seperti hipertensi, diabetes), sosial ekonomi, hingga gaya hidup (merokok, konsumsi alcohol, kurang olahraga).

### **2. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan IKM secara mandiri di tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi Sukma-e dengan sampel yang dilaksanakan survei adalah Dinas Kesehatan, 27 Puskesmas dan Labkesda. Pada IKM ada 9 unsur yang diukur antara lain :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

**Data IKM Dinas Kesehatan Tahun 2019-2022** bisa dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.1 IKM Dinas Kesehatan Tahun 2019-2022

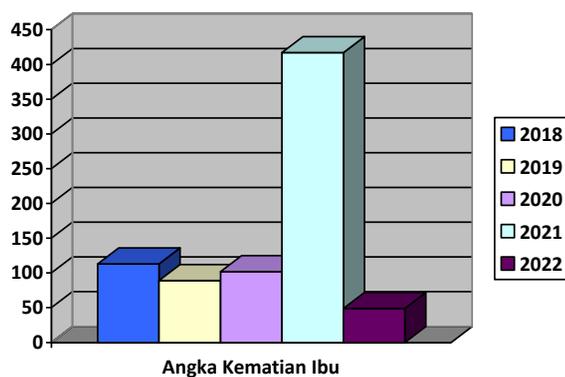
Dari grafik diatas, IKM Dinas Kesehatan mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021, namun ada penurunan pada tahun 2022. Dari 9 unsur, yang mengalami penurunan/rendah adalah Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, pengaduan, prosedur layanan, serta persyaratan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,81 dari unsur layanan, sarpras mendapatkan nilai tertinggi kedua 3,66 serta perilaku mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,4. Drai hasil tersebut yang dapat dilakukan upaya perbaikan antara lain :

1. Terus menerus melaksanakan perbaikan sarana prasarana pelayanan kesehatan, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dan mutu layanan di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Labkesda.
2. Meningkatkan sosialisasi ke pengguna layanan karena untuk penilaian IKM sudah menggunakan aplikasi yang dapat diakses di HP. Dimana pengguna layanan di puskesmas belum tentu membawa HP utamanya untuk lansia.

### 3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Berdasarkan data capaian AKI Dinas Kesehatan Tahun 2022, terdapat 8 ibu yang meninggal atau 49,94/100.000 KH. Dimana angka tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 67 ibu atau 417/100.000 KH. Berikut gambaran realisasi kematian ibu tahun 2018-2022 :



Penurunan AKI 2022 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin lebih baik dari tahun 2021. Upaya yang terus menerus dilaksanakan adalah :

- Mempersiapkan kesehatan ibu di 1000 Hari Pertama Kehidupan
- Meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang reproduksi, kampanye pemberian tablet Fe pada remaja putri,
- Peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil dengan ANC terpadu yang mewajibkan setiap Ibu hamil mengikuti pemeriksaan secara menyeluruhan, mulai gigi, laboratorium dan konsultasi gizi.
- Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh kader kesehatan yang ada di desa
- Persalinan 4 (empat tangan)

- f. Pelaksanaan audit maternal perinatal untuk mengetahui semua penyebab kematian Ibu sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan pada kehamilan/persalinan yang lain.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan penolong persalinan (bidang, dokter spesialis kandungan)
- h. Meningkatkan program inovasi tentang pelayanan ibu hamil.

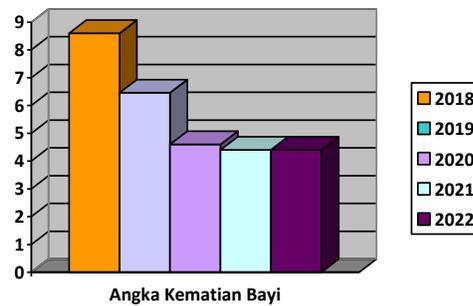
#### 4. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: 70 (sangat tinggi), 40 – 70 tinggi, 20-39 sedang, dan <20 rendah. Angka Kematian Bayi di tahun 2022 adalah 4,43/1.000 KH atau 71 bayi meninggal. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka kematian bayi adalah sama yaitu 4,4 dengan 71 bayi. Hal ini menunjukkan Dinas Kesehatan belum bisa menurunkan dari target yang ditetapkan tahun 2022.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk menahan laju kematian bayi tentu tidak bisa dipisahkan dari upaya penurunan kematian ibu melahirkan, karena merupakan satu kesatuan. Selain penguatan ke dalam Dinas Kesehatan, yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah penguatan pada kelembagaan Satgas Penakib (Satuan Tugas Penurunan Kematian Ibu dan Bayi), penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal dari Puskesmas ke Rumah Sakit (PONEK), penguatan keterlibatan masyarakat pada program Kesehatan Ibu dan Anak melalui

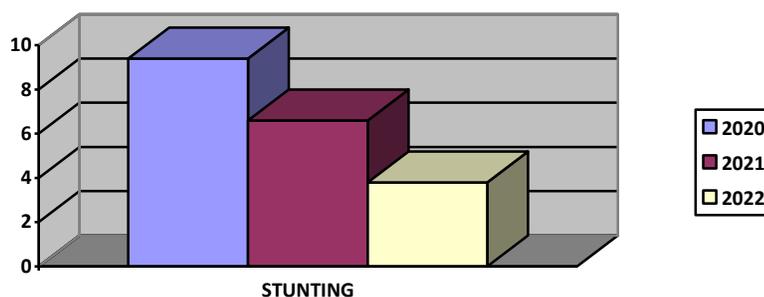
P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), serta meningkatkan pelayanan kesehatan bayi, mulai melaksanakan Kunjungan neonatus secara lengkap,, peningkatan pemberian ASI Eksklusif, edukasi ke masyarakat tentang Makanan Pendamping ASI, hingga imunisasi dasar lengkap sampai bayi berusia 1 tahun. Dan berikut gambaran angka kematian bayi tahun 2018-2022 :



##### 5. Persentase Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Berikut gambaran stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2022 :



Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang

secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Stunting dipengaruhi oleh pola makan, pola asuh, sanitasi dan akses air bersih. Untuk itu upaya yang dilakukan antara lain :

a. Intervensi spesifik :

Intervensi Spesifik dikelompokkan menjadi 4 yaitu untuk remaja putri, ibu hamil, anak usia 0-23 bulan dan anak usia 24-59 bulan. Untuk Remaja Putri dan Calon Pengantin adalah pemberian Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri, Pemeriksaan kesehatan dan pemberian MMN. Untuk Ibu Hamil adalah suplementasi Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri dan Ibu Hamil, Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik dan Kelompok miskin, Pemeriksaan Kehamilan/Ante Natal Care untuk Ibu Hamil, Promosi dan konseling menyusui, Promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Pemantauan pertumbuhan, Suplementasi kapsul vitamin A, Imunisasi, Suplementasi zinc. Balita dengan intervensi balita wasting dengan PMT Balita (Biskuit, PMT Lokal, susu), Pendampingan Balita Gizi Buruk, akses jaminan kesehatan, pelayanan KB serta Peningkatan sanitasi dan akses air bersih. Peningkatan sanitasi dan akses air bersih, telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan melaksanakan pembangunan jamban keluarga sebanyak 181 jamban dari dana DID, APBD serta tambahan pembangunan jamban sebanyak 7 ribu jamban dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, hingga Kabupaten Mojokerto telah bebas ODF. Sanitasi dan Akses Air Bersih ditingkatkan akan menjauhkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan.

b. Pengadaan sarana prasarana pengukuran tumbuh kembang balita yaitu antropometri sebanyak 813 unit.

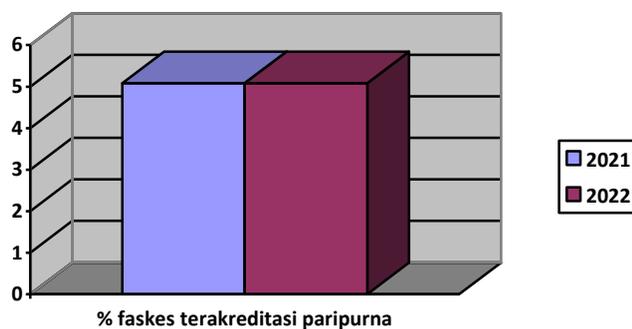
c. Pengadaan susu balita gizi buruk dan kurang sebanyak 2900 kaleng dan 145 balita

d. Pengadaan susu ibu hamil 6120 kotak dan 306 ibu hamil

- e. Kampanye “Isi Piringku” adalah dengan pola konsumsi dengan gizi seimbang. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat.
- f. Sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya pola asuh. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan. Bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusui dini (IMD) dan berupayalah agar bayi mendapat colostrum air susu ibu (ASI) dan memberikan ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan.
- g. Meningkatkan inovasi program dengan mereplikasi inovasi antara inovasi Jumat Ceria, Caping Mas, Mama mita (memantau menu gizi ibu hamil dan balita dengan *cooking class*).

6. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna

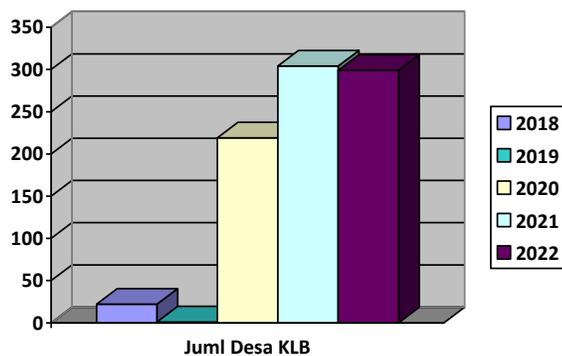
Sejak adanya pandemi, kegiatan akreditasi belum dilaksanakan. Termasuk pada tahun 2022. Meskipun sudah terjadi penurunan jumlah kasus covid-19 namun kegiatan penilaian akreditasi tahun 2022 tidak bisa dilaksanakan. Sehingga target adanya puskesmas dan faskes yang terakreditasi paripurna tahun 2022 tidak bisa terpenuhi. Puskesmas di Kabupaten Mojokerto yang terakreditasi paripurna hanya 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Watukenongo sedangkan rumah sakit yang telah melaksanakan re akreditasi tahun 2022 adalah RSUD Prof Dr Soekandar dan RSUD RA Basoeni dengan hasil paripurna. Berikut gambaran fasilitas kesehatan yang telah diakreditasi tahun 2018-2022 :



Meskipun di tingkat puskesmas belum dilaksanakan penilaian kembali, namun Dinas Kesehatan tetap melaksanakan peningkatan mutu layanan yaitu dengan mengadakan workshop mutu, pelatihan standar elemen penilaian akreditasi puskesmas. Sehingga apabila tahun 2023 dilaksanakan akreditasi maka puskesmas lebih siap dan bisa mencapai hasil yang paripurna.

7. Persentase Desa KLB yang ditangani yaitu jumlah desa yang mengalami kejadian luar biasa. Dan pada tahun 2021, jumlah desa yang mengalami KLB, yaitu 304 desa. Jika dibandingkan dengan capaian 2022, jumlah desa yang terdampak KLB menurun yaitu 299 desa. Dimana untuk tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 194 desa. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2022, masih tinggi kasus Covid-19 dengan varian omicron.

Berikut gambaran Persentase Desa (KLB) tahun 2018-2022 :



Yang dapat dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah mencegah agar tidak meluas pandemi Covid-19 ke desa lainnya yang belum ada kasus covid-19. Upaya yang dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan protokol kesehatan di masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat
- b. Meningkatkan cakupan vaksinasi semua kelompok usia, dari imunisasi perdana hingga booster baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat umum baik lansia dan ibu hamil.

8. Persentase ODF (desa ODF)

*Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

indikator ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kehidupan yang baik dengan menerapkan hidup bersih dan sehat. Sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2022, desa ODF yang harus dicapai di Kabupaten Mojokerto adalah 70% atau 213 desa. Namun, seiring dengan tujuan penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto maka dilakukan upaya pencapaian desa ODF sampai dengan 100%. Dilaksanakan dengan pembangunan jamban keluarga dan jamban komunal yang tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, namun juga perangkat daerah lainnya untuk membantu pemecuan, maupun pelaksanaan pembangunan jamban seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Sehingga pada tahun 2022, Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan sebagai Kabupaten ODF.

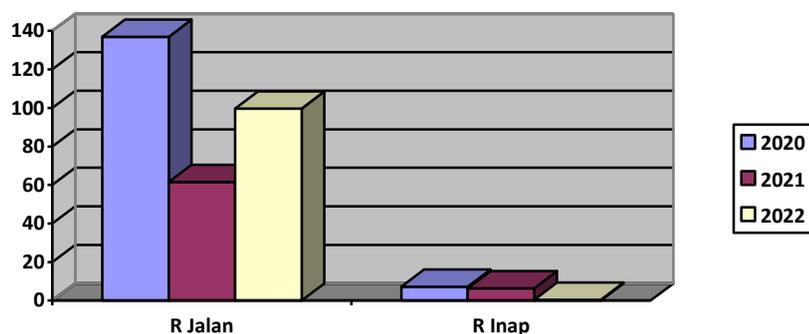
#### 9. Penghargaan swastisaba padapa

Program Kabupaten Kota Sehat (KKS) bertujuan agar tercapai kondisi Kabupaten Kota bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakatnya. Penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) bukanlah sebuah lomba melainkan apresiasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan KKS sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor:1138/Menkes/PB/VIII/2005. Penyelenggaraan Program KKS melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui Tatanan dalam KKS. Ada 7 tatanan KKS, yaitu Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum; Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi; Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat; Kawasan Pariwisata Sehat; Kawasan Pangan dan Gizi; Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri; serta Kehidupan Sosial yang Sehat. Setiap tahun genap, dilakukan verifikasi KKS tingkat provinsi. Sementara penghargaannya diberikan setiap tahun ganjil. Kriteria penghargaan adalah Padapa kualifikasi pemantapan (2 tatanan); Wiwerda untuk kualifikasi pembinaan (3 tatanan); dan Wistara untuk kualifikasi pengembangan (5 tatanan). Pada tahun 2022, ditargetkan kabupaten Mojokerto mengikuti penilaian Kabupaten Sehat untuk mendapatkan penghargaan swastisaba padapa, namun karena pandemic

masih berlangsung maka kegiatan pengharagaan tidak dilaksanakan. Sehingga tahun 2022, target untuk mendapatkan penghargaan swastisaba padapa tidak tercapai. Direncanakan pada tahun 2023 Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan penilaian untuk 9 tatanan.

10. Persentase kunjungan masyarakat ke faslitas kesehatan : R Jalan dan R Inap

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan adalah jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. Sedangkan jumlah kunjungan pasien rawat inap adalah jumlah orang yang berkunjung kefasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk melihat kualitas dari fasilitas kesehatan yang ada. Sesuai dengan pembagian pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jumlah masyarakat yang berkunjung ke puskesmas menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Karena puskesmas adalah pelaksanaan pembanunan kesehatan di promotif dan preventif. Semakin banyak yang berkunjung di puskesmas, perlu dilakukan pendalaman apakah kegiatan promotif dan preventif kurang berjalan dengan efektif sehingga banyak masyarakat yang sakit. Sedangkan kunjungan rawat inap dipergunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan rawat inap baik di puskesmas maupun di RS. Seperti data kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020-2022 :



Persentase kunjungan rawat jalan tahun 2020 adalah 137%, 2021 61,5% dan tahun 2022 adalah 99,6%. Sedangkan jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2020 adalah 7,2%, tahun 2021 61,5% dan tahun 2022 adalah 0,35%. Untuk kunjungan rawat jalan terdapat peningkatan dari tahun 2021 sedangkan kunjungan rawat inap terdapat penurunan. Hal ini dikarenakan turunnya minat masyarakat untuk rawat inap di puskesmas karena puskesmas pernah menjadi ruang isolasi pasien Covid-19. Selain itu pada tahun 2022, ada beberapa puskesmas rawat inap yang mengalami perbaikan khususnya di ruang rawat inapnya, seperti puskesmas Bangsal dan puskesmas Dawarblandong.

#### 11. Persentase Indikator SPM yang mencapai target

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM Bidang Kesehatan meliputi :

- 1) setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar;
- 2) setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar;
- 3) setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 4) setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 5) setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- 6) setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- 7) setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- 8) setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 9) setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 10) setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;

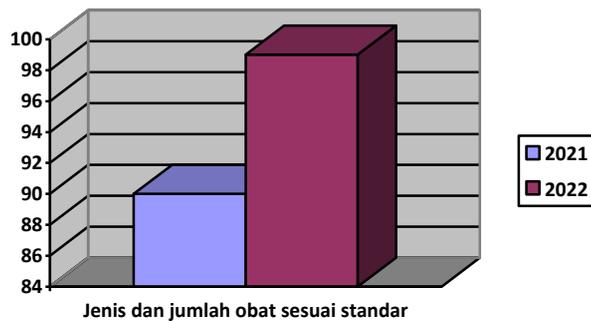
- 11) setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai dengan standar; dan
- 12) setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai dengan standar.

Mengingat SPM Bidang kesehatan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk penyediaan pelayanan dasar, maka dilakukan penilaian dari 12 indikator yang ada, berapa yang telah mencapai target. Karena itu akan memberikan gambaran sejauh mana pemerintah daerah menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Pada tahun 2022, ditetapkan target 9 indikator SPM bidang kesehatan yang mencapai target, dan hasil pencapaian tahun 2022, jumlah indikator yang mencapai target ada 10 indikator (83,3%). Tahun 2022 juga menunjukkan adanya peningkatan capaian indikator yang tercapai jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 9 indikator yang tercapai (75%). Faktor pendorong keberhasilan peningkatan jumlah indikator yang melebihi target adalah tersedianya alat kesehatan, bahan medis habis pakai sehingga bisa dilaksanakan kegiatan skrining kesehatan sesuai dengan target sasaran yang ada.

#### 12. Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar

Indikator tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Upaya yang dilakukan adanya dengan penyediaan obat dan vaksin sesuai dengan formulasi nasional. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial. Selain dengan penyediaan obat dan vaksin untuk mendukung capaian indikator tersebut juga dilaksanakan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi dan puskesmas. Pada tahun 2022, ditetapkan target persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar adalah 90% dan pencapaian kinerja di tahun 2022 adalah 99%. Sedangkan dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 90%, capaian 2022 telah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan obat baik jenis dan jumlah yang sesuai dengan standar. Dengan demikian pelayanan kesehatan di puskesmas

dapat dilaksanakan secara paripurna. Berikut gambaran persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar tahun 2021-2022:



### 13. Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai standar

Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan merupakan peralatan yang wajib dimiliki untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna. Untuk menunjang hal tersebut pada tahun 2022 ditetapkan target persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar adalah 90%. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengadaan alat kesehatan yang mendukung program, mulai pengadaan stetoskop, tensimeter, alat pengukur tinggi badan, alat pengukur berat badan, alat pemeriksa gula darah, kolesterol, asam urat hingga pengadaan USG 2D. Semua peralatan kesehatan yang diadakan bertujuan untuk meningkatkan akurasi diagnosa suatu penyakit, sehingga dapat dilakukan pengobatan yang adekuat.

### 14. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar

Sesuai Undang-undang no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyatakan bahwa “Pemerintah mengatur perencanaan, Pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dalam SKN, pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dilakukan dengan 4 pokok yaitu : (1) perencanaan SDM Kesehatan, (2) pengadaan SDM Kesehatan, (3) pendayagunaan SDM Kesehatan serta (4) pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Dalam upaya pemenuhan SDM kesehatan di era pelayanan kesehatan semesta harus mencakup pada empat faktor yaitu: ketersediaan jumlah

dan jenis SDM Kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan, kompetensi/kualitas SDM Kesehatan dan Kinerja SDM Kesehatan. Kondisi saat ini dalam upaya memenuhi SDM Kesehatan masih ditemukan gap pada ke empat indikator SDM Kesehatan tersebut sehingga banyak yang harus dilakukan dengan fokus pada percepatan pemenuhan SDM Kesehatan agar akses masyarakat pada SDM Kesehatan lebih terjangkau lagi sehingga pencapaian pelayanan kesehatan semesta bisa cepat direalisasikan. Untuk memperkecil gap tersebut, diperlukan upaya-upaya pemenuhan, misalnya pada ketersediaan SDM Kesehatan maka diperlukan perencanaan dan pemenuhan tenaga kesehatan yang memenuhi standar. Standar pemenuhan nakes di puskesmas adalah 9 nakes yang terdiri dari dokter umum, gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesling, farmasi, gizi dan laborat/atml. Untuk memenuhi itu belum semua puskesmas karena tidak adanya alokasi/formasi untuk CPNS. Hal ini sesuai dengan capaian kinerja tahun 2022, dimana ditargetkan ketersediaan nakes di faskes adalah 75% faskes telah memiliki nakes yang terstandar, namun capaian di 2022 hanya 55%. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian 2022 tidak bisa mencapai target, diantaranya tidak adanya formasi CPNS, banyaknya nakes yang pensiun dan belum ada nakes yang menggantikan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di Puskesmas. Upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan merekrut tenaga profesional melalui dana BLUD Puskesmas.

15. Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan

- Apotik (28 apotek)
- Toko Obat (2 toko obat)
- Umot (1 umot)
- PIRT (120 sertifikat)

Dalam menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna, tidak hanya diperlukan ketersediaan alat kesehatan, obat dan vaksin yang memenuhi standar dalam jumlah dan jenis. Namun, kegiatan Pengawasan pada pelaku penyedia obat dan makanan juga perlu ditingkatkan. Untuk mewujudkan kinerja pengawasan pada penyedia obat dan makanan ditetapkan indikator pengawasan dan pengendalian

yang meliputi pengawasan apotek, toko obat, UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) dan penerbitan sertifikat PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Pengawasan ini penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan mengingat obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus dipastikan tidak berbahaya dan menimbulkan masalah kesehatan. Dari target kinerja yang ditetapkan tahun 2022, dari 4 indikator, ada 3 indikator yang mencapai target, yaitu pembinaan apotek yang ditargetkan 28 apotek, di tahun 2022 bisa melaksanakan pembinaan 55 apotek. Indikator selanjutnya yang mencapai target adalah pengawasan/pembinaan toko obat dan UMOT. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Mojokerto hanya tersedia 1 toko obat dan 2 UMOT. Sehingga memudahkan bagi tenaga farmasi di Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan. Sedangkan indikator penerbitan sertifikat PIRT yang ditargetkan mampu menerbitkan 120 sertifikat, di tahun 2022 hanya bisa menerbitkan 112 sertifikat. Hal ini dikarenakan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan ijin edar PIRT hanya 112 orang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan ijin edar adalah dengan koordinasi dengan petugas sanitarian puskesmas untuk menyisir di wilayah puskesmas mendata pelaku usaha pangan yang belum mempunyai ijin edar.

16. Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan.

Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro (DIV) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen penting di samping tenaga kesehatan dan obat dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, disebutkan bahwa Alkes dan PKRT yang beredar dan digunakan dalam pelayanan kesehatan haruslah memiliki izin edar dan terjamin mutu, keamanan, kemanfaatan dan terjangkau. Sampling Alkes dan PKRT adalah kegiatan pengambilan sample produk Alkes dan PKRT di peredaran untuk selanjutnya dilakukan pengujian terhadap konsistensi keamanan, manfaat dan mutu produk. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan produk Alkes dan PKRT di laboratorium yang terakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memastikan kesesuaian

produk Alkes dan PKRT yang beredar sesuai dengan standard yang berlaku. Tujuannya adalah menjamin konsistensi mutu produk pada pasca pemasaran (*post-market*), melindungi masyarakat dari penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan serta, mendeteksi sedini mungkin adanya produk palsu dan produk yang tidak mempunyai Nomor Izin Edar (NIE). Pada tahun 2022, pada kegiatan pengawasan toko alkes dan PKRT ditargetnya 3 PRT-PKRT, dan capaian 2022 adalah 4 PRT-PKRT (Perusahaan rumah tangga dan perbekalan kesehatan rumah tangga). Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 ada penambahan 1 PRT-PKRT . Kondisi ini menunjukkan komitmen dari Dinas Kesehatan untuk menjaga mutu alkes dan PKRT yang beredar di masyarakat tidak berbahaya.

#### 17. Persentase Rumah Tangga BerPHBS

PHBS di Tatanan Rumah Tangga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing masing anggota keluarga agar memiliki kemaunan dan kemampuan dalam mempraktikkan PHBS. Sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Rumah tangga atau keluarga yang sehat dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan PHBS dan menciptakan dukungan lingkungan yang sehat. Rumah tangga atau keluarga yang sehat merupakan aset utama pembangunan yang perlu dipelihara terus menerus, ditingkakan dan dilindungi kesehatannya. Sehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga atau anggota keluarga untuk melaksanakan PHBS, dan ikut berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat.

Bahwa rumah tangga atau keluarga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkakan dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena gangguan berbagai penyakit. Angka kesakitan dan kematian penyakit infeksi dan non infeksi dapat dicegah dengan PHBS. Rumah Tangga Ber-PHBS adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di Rumah Tangga, yaitu : (1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, (2) Memberi bayi ASI Eksklusif, (3) Menimbang balita setiap bulan, (4) Menggunakan air bersih, (5) Mencuci tangan dengan air

bersih dan sabun, (6) Menggunakan jamban sehat (7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu (8) Makan buah dan sayur setiap hari (9) Melakukan Aktivitas Fisik setiap hari, (10) Tidak merokok di dalam rumah. Dari capaian tahun 2022, persentase rumah tangga yang berPHBS adalah 85% melebihi target yang ditetapkan yaitu 72%. Hal ini dikarenakan gencarnya promosi kesehatan terkait PHBS baik melalui media cetak, elektronik, penyuluhan tatap muka dengan masyarakat maupun melalui media sosial. Sehingga semakin banyak masyarakat/rumah tangga yang menerapkan 10 indikator PHBS.

18. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif

UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan bimbingan petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan diharapkan masyarakat mampu mengatasi sendiri masalah kesehatan yang mereka hadapi. Yang mana UKBM ini mencakup kemampuan untuk memelihara dan melindungi diri baik secara individual, kelompok dan atau masyarakat dari ancaman kesehatan. UKBM merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, UKBM diharapkan dapat berkembang kearah bentuk yang ideal yaitu bentuk yang lestari dan mandiri. Ditopang oleh kemampuan pengorganisasian dan pendanaan oleh masyarakat. Jenis UKBM antara lain : Posyandu balita, Posyandu Lansia, Posyandu remaja, Poliklinik kesehatan Desa, Pos Obat Desa, Pos Gizi, Pos penyuluhan KB, PosKestren, Saka Bhakti Husada, Posbindu, Dana Sehat, Pos UKK, Pansimas dan karang taruna husada. Capain kinerja persentase UKBM yang aktif tahun 2022 adalah 98% dari target 81,90%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran tinggi untuk dapat ikut serta dalam pembangunan kesehatan. Begitu juga dengan dukungan pemerintah desa yang cukup tinggi. Dibuktikan dengan adanya peningkatan strata dari posyandu. Posyandu kenaikan strata Madya ke purnama sebanyak 108 posyandu dan posyandu strata Purnama yang naik ke strata mandiri ada 42 posyandu.

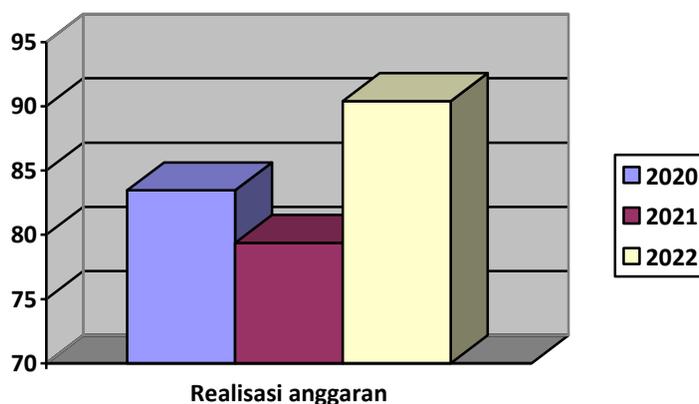
19. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai

Program yang ada di perangkat daerah adalah wajib untuk dilaksanakan dan diupayakan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Karena pencapaian program menjadi tolak ukur kinerja dari perangkat daerah. Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai terdiri dari indikator kinerja utama (IKU) kepala Dinas Kesehatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja. IKU Dinas Kesehatan terdiri dari 23 indikator yang mana dari 23 indikator terdapat 19 indikator yang mencapai target (83%). Capaian tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan di tahun 2022 yaitu 80%. Capaian yang mampu melebihi target didukung dengan komitmen Dinas Kesehatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan.

20. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah

Realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (*budget*). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi. Pada tahun 2022, capaian realisasi anggaran adalah 90,40% yang mana mampu melebihi target 2022 yaitu 88%. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, yaitu 2020-2021, telah terjadi peningkatan capaian realisasi yaitu di tahun 2020 83,46% dan di tahun 2021 adalah 79,37% sebagaimana terdapat pada grafik berikut :



Hal ini menunjukkan komitmen seluruh pegawai Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan akuntabel. Karena realisasi anggaran juga menjadi kinerja masing-masing personil/pegawai di Dinas Kesehatan.

21. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

- (1) Dimensi kualifikasi : mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- (2) Dimensi kompetensi. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Dimensi kinerja. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Tingkat Profesionalitas ASN adalah : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

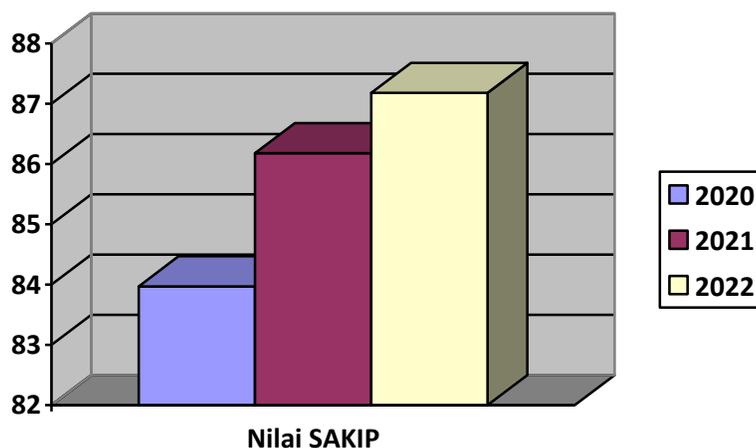
Dari capaian IP ASN Dinas Kesehatan tahun 2022 hanya 59,10 (sesuai data per Juni 2022), dimana capaian tersebut dibawah target yang ditetapkan yaitu 70. Capaian IP ASN Dinas Kesehatan sangat rendah karena kurangnya pelatihan yang dilaksanakan oleh pegawai di Dinas Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disiapkan kegiatan pelatihan bagi pegawai Dinas Kesehatan untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi pegawai.

## 22. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi SAKIP ini dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Dari SAKIP inilah akan diketahui bahwa setiap rupiah anggaran yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebenarnya memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berdasarkan data capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2022, terjadi peningkatan dari target yang ditetapkan. Target 2022 adalah 84,77 dan nilai yang dicapai 2022 adalah 87,18. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020-2022, terjadi peningkatan nilai SAKIP. Sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

### 23. Nilai RB Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-

hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap **8 area perubahan** terdiri dari: Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran), Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*)), Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif), Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.), Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN), Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi), Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat), *Mindset* dan *cultural Set* Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Dari capaian nilai RB Dinas Kesehatan tahun 2022, terjadi penurunan baik dari target yang ditetapkan dan dengan hasil capaian tahun 2021. Pada tahun 2022, target nilai RB adalah 83,99 namun capaian 2022 adalah 74,77 dan nilai tersebut jika dibandingkan capaian 2021 juga menurun yang mana capaian 2021 adalah 77,79. Untuk itu, pada tahun 2023 perlu ada peningkatan evaluasi pada 8 area perubahan.

24. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam melaksanakan program kesehatan tentunya tidak semua program bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Karena tidak sedikit kendala yang dihadapi baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknis pelaksanaan program. Untuk melaksanakan program kesehatan

yang dapat mencapai target, terkadang dibutuhkan inovasi/ terobosan dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan telah menetapkan target 3 inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi, artinya telah dilaksanakan dan berkelanjutan. Bahkan telah direplikasi di unit kerja/upt yang ada di Dinas Kesehatan. Tiga inovasi yang ditargetkan tahun 2022 adalah E Presensi, E Farmasi, dan Inovasi Permensila dari puskesmas Bangsal yang direplika untuk 26 Puskesmas. Capaian untuk 2022, adalah 6 inovasi yang terdiri dari E Farmasi, E Presensi, Permensimela, Caping Mas, Teropong Sakti, Sinergi. Dimana untuk Caping Mas telah masuk dalam 30 top Kovablik Jawa Timur. Pencapaian inovasi yang melebihi target di tahun 2022 adalah bukti dari komitmen dari Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di tahun 2022.

Dari kinerja SPM Bidang Kesehatan, terdapat capaian kinerja SPM yang masih belum mencapai target. Dari 12 indikator yang tercapai target pelayanan 100% ada 4 indikator yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
- b. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- c. Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus
- d. Pelayanan kesehatan Orang dengan TB

Sedangkan 8 indikator lainnya berada di bawah 95%. Dari 8 indikator yang capaiannya dibawah 95% terdapat 2 indikator yang capaiannya dibawah 70%, yaitu indikator pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV hanya 65,99% dan indikator pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang hanya mencapai 58,23%. Hal ini disebabkan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV hanya memeriksa sasaran kunci saja. Kedepannya perlu dilaksanakan pemeriksaan pada seluruh masyarakat. Namun ada tantangan yaitu pemeriksaan harus dilaksanakan secara sukarela atau tanpa paksaan. Sedangkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi capaiannya rendah bisa disebabkan validitas alat ukur tekanan darah kurang, serta kurangnya kemampuan nakes maupun kader posbindu dalam melaksanakan pengukuran tekanan darah. Sehingga tidak mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat.

Upaya yang dilaksanakan adalah memperluas sasaran pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tidak hanya populasi kunci

tapi seluruh masyarakat, pengadaan alat kesehatan menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi seperti pengadaan stetoskop dan tensimeter (pegas) untuk revitalisasi alkes pengukur tekanan darah sehingga hasilnya bisa akurat.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD**

Melihat kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 dan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berikut isu-isu strategis yang perlu diperhatikan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan ke depan, yaitu tahun 2024 adalah:

1. Penurunan AKI dan AKB yang lambat
2. Penurunan Prevalensi Stunting yang masih lambat
3. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
4. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis Tenaga
5. Pemenuhan Peralatan Kesehatan yang terstandar yang belum optimal
6. Pengembangan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan yang masih belum optimal

Untuk mengimplementasikan isu-isu strategis tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menekankan pada penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

#### **a. Pemerataan Pelayanan**

Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Hal ini terkait dengan usaha menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan dilengkapinya sarana dan prasarana di Puskesmas serta jaringannya seperti Ponkesdes dan Polindes maka dapat memberikan pelayanan yang merata. Walaupun di daerah yang jauh dari kota atau di wilayah pegunungan. Dengan adanya perawat Ponkesdes dengan anggaran sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memberikan dampak yang

signifikan kepada penurunan angka kematian ibu maupun angka kemayian bayi.

Tantangan dan hambatan yang ada adalah tenaga kesehatan terutama perawat terkadang tidak mau di tempatkan di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian, sehingga hal yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitas kesehatan yang lebih baik agar tenaga kesehatan mau bekerja dan melayani masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan.

Tahun 2024 fokus perencanaan pemerataan pelayanan kesehatan tetap pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, yaitu pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas dan Pustu, diharapkan peningkatan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dapat merata ke semua lapisan masyarakat. Pembangunan ini bertahap sampai tahun selanjutnya

#### b. Kualitas Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki 27 Puskesmas yang tersebar di 18 Kecamatan yang ada. Untuk peningkatan kualitas pelayanan sejak tahun 2021, 27 Puskesmas di kabupaten Mojokerto telah berubah status pengelolaan keuangannya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Diharapkan dengan perubahan ini, puskesmas memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan.

Selain pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan juga menjadi prioritas. Karena yang sampai saat ini masih kuatitas sumber daya manusia masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memasuki masa pensiun tetapi belum ada penggantinya adalah salah satu penghambat pelayanan kesehatan. Ketersediaan dokter umum dan dokter gigi yang juga sangat terbatas di Puskesmas.

## **2.4 Review Terhadap RKPD**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 5) Program Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan; Pagu anggaran indikatif tahun 2024 untuk urusan kesehatan yang direncanakan dalam RKPD sebesar Rp. 300.265.780.403,-. Sedangkan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan membutuhkan dana sebesar Rp. 300.265.780.403,- Hal ini bisa dilihat pada tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (TC.31)  
Kabupaten Mojokerto

Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Dinas Kesehatan	<b>Nilai SAKIP PD</b>	<b>85,57 (A)</b>	<b>175.715.993.653</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Dinas Kesehatan	<b>Nilai SAKIP PD</b>	<b>85,57 (A)</b>	<b>175.715.993.653</b>		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik	84%	27.500.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik	84%	27.500.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000		
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes	3 dok (Renja, Renstra, perubahan renstra)	10.000.000			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes	3 dok (Renja, Renstra, perubahan renstra)	10.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	2 dok	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	2 dok	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun	1 dok	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun	1 dok	0		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	10.000.000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	10.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	0		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah keg koordinasi penyusunan lap kinerja	6 kali	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah keg koordinasi penyusunan lap kinerja	6 kali	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dok evaluasi yang disusun		7.500.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok evaluasi yang disusun		7.500.000		
			Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)	7 dok	7.500.000			Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)	7 dok	7.500.000		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran PD	90%	124.565.493.653	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	90%	124.565.493.653		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan		124.565.493.653		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan		124.565.493.653		
			Dinkes	14 dok SPM	70.714.046.000			Dinkes	14 dok SPM	70.714.046.000		

		Insentif	1 paket	39.924.347.653			Insentif	1 paket	39.924.347.653	
		BOP Dinkes dan Pusk	12 bulan	13.927.100.000			BOP Dinkes dan Pusk	12 bulan	13.927.100.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	30.000.000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	30.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	30.000.000		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	30.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	74	40.000.000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	74	40.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring pegawai	12 keg	15.000.000		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring pegawai	12 keg	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	25.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	25.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	498.000.000	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	498.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi yang diadakan	1 paket	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi yang diadakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 paket	25.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yg diadakan	1 paket	54.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yg diadakan	1 paket	54.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	1 paket	38.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	1 paket	38.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan buku perundang-undangan yang diadakan	1 paket	3.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan buku perundang-undangan yang diadakan	1 paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diadakan	1 paket	66.000.000		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diadakan	1 paket	66.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang diadakan	1 paket	7.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang diadakan	1 paket	7.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket	200.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket	200.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket	100.000.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket	100.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional Daerah		-	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional		-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan	0	-		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan	0	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90%	275.000.000	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90%	275.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	250.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	250.000.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	25.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	25.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik	90%	300.000.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik	90%	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 unit	100.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang direhab	2 gedung	200.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	2 gedung	200.000.000	
9	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%	92%	49.980.000.000	9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%	92%	49.980.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Persentase realisasi anggaran blud		49.980.000.000		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran blud		49.980.000.000	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>AKI</b>	<b>112/100.000 KH</b>	<b>120.099.786.750</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>AKI</b>	<b>112/100.000 KH</b>	<b>120.099.786.750</b>
			<b>AKB</b>	<b>4,3/1.000 KH</b>					<b>AKB</b>	<b>4,3/1.000 KH</b>	
			<b>Persentase Stunting</b>	<b>19%</b>					<b>Persentase Stunting</b>	<b>19%</b>	
			<b>Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna</b>	<b>51% (15 Pusk)</b>					<b>Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna</b>	<b>51% (15 Pusk)</b>	
			<b>Persentase KLB yang ditangani</b>	<b>47% (144 desa)</b>					<b>Persentase KLB yang ditangani</b>	<b>47% (144 desa)</b>	
			<b>Persentase ODF</b>	<b>90%</b>					<b>Persentase ODF</b>	<b>90%</b>	
			<b>Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)</b>	<b>swastisaba wiwerda</b>					<b>Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)</b>	<b>swastisaba wiwerda</b>	
			<b>Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap</b>	<b>63,5% dan 6,4%</b>					<b>Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap</b>	<b>63,5% dan 6,4%</b>	
			<b>Persentase Indikator SPM yang mencapai target</b>	<b>84% (10indikator)</b>					<b>Persentase Indikator SPM yang mencapai target</b>	<b>84% (10indikator)</b>	
			<b>Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar</b>	<b>91%</b>					<b>Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar</b>	<b>91%</b>	
			<b>Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar</b>	<b>91%</b>					<b>Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar</b>	<b>91%</b>	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				50.802.793.750	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			50.802.793.750	
			Jumlah gedung puskesmas yang direhab	5 puskesmas				Jumlah gedung puskesmas yang direhab	5 puskesmas		
			Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik	10 gedung pustu				Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik	10 gedung pustu		

			Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)	26 sarana				Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)	26 sarana		
			Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 set				Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 set		
			Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 paket				Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 paket		
			Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	11 paket				Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	11 paket		
			Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	7 paket				Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	7 paket		
			Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 paket				Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 paket		
2	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 puskesmas	13.666.815.000	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 puskesmas	13.666.815.000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dipelihara	5 puskesmas	11.505.000.000	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipelihara	5 puskesmas	11.505.000.000	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Pustu yang dipelihara	10 pustu	6.500.000.000	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang dipelihara	10 pustu	6.500.000.000	
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah dok DPLH (UKL, UPL), SPPL (Surat pengelolaan Lingkungan)	7 DPHL, 6 SPPL	300.000.000	5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dok DPLH (UKL, UPL), SPPL (Surat pengelolaan Lingkungan)	7 DPHL, 6 SPPL	300.000.000	
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)	1 paket	10.500.000.000	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)	1 paket	10.500.000.000	
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah alkes di 27 puskesmas yang di kalibrasi	1 paket	170.000.000	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alkes di 27 puskesmas yang di kalibrasi	1 paket	170.000.000	
8	Pengadaan Obat, Vaksin				4.827.951.000	8	Pengadaan Obat, Vaksin			4.827.951.000	
			Jumlah obat yang diadakan	1 paket	2.000.000.000			Jumlah obat yang diadakan	1 paket	2.000.000.000	
			Jumlah obat yang diadakan	1 paket	2.652.250.000			Jumlah obat yang diadakan	1 paket	2.652.250.000	
			Distribusi e logistik	12 keg	55.701.000			Distribusi e logistik	12 keg	55.701.000	
			Penunjang DAK	12 keg	120.000.000			Penunjang DAK	12 keg	120.000.000	
9	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes	1 paket	2.733.027.750	9	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes	1 paket	2.733.027.750	
10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah IPAL yang dipelihara	7	600.000.000	10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL yang dipelihara	7	600.000.000	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target	30 layanan	68.866.993.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target	30 layanan	68.866.993.000	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan, monitoring evaluasi program 6 kali, orientasi pemantapan program ke nakes dan masyarakat 3 kali, audit parinatal 4 kali, pelacakan kasus puskesmas dan RS 25 kali, supervisi fasilitatif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaan aplikasi P4K	18.550	366.630.000	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan, monitoring evaluasi program 6 kali, orientasi pemantapan program ke nakes dan masyarakat 3 kali, audit parinatal 4 kali, pelacakan kasus puskesmas dan RS 25 kali, supervisi fasilitatif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaan aplikasi P4K	18.550	366.630.000
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil bersalin	17.658	4.840.000.000	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil bersalin	17.658	4.840.000.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, orotentasi bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali	17.002	242.000.000	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, orotentasi bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali	17.002	242.000.000
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah keg monitoring keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali	66.852	151.250.000	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah keg monitoring keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali	66.852	151.250.000
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi	40.400	363.000.000	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi	40.400	363.000.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan	107.100	60.500.000	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan	107.100	60.500.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)	153.000	363.000.000	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)	153.000	363.000.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	81.776	181.500.000	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	81.776	181.500.000

9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan	48.700	181.500.000	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan	48.700	181.500.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan	2.511	181.500.000	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan	2.511	181.500.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah suspek TB yang diperiksa	2.913	363.000.000	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah suspek TB yang diperiksa	2.913	363.000.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah suspek/resiko HIV yang diperiksa	13.002	544.500.000	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah suspek/resiko HIV yang diperiksa	13.002	544.500.000
		ketersediaan operasional Hibah KPA	12 bulan	200.000.000			ketersediaan operasional Hibah KPA	12 bulan	200.000.000
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Pendudukan pada Kondisi KLB		1.500.000.000	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Pendudukan pada Kondisi KLB		1.500.000.000
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah gizi buruk yang ditangani	90 balita	2.000.000.000	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah gizi buruk yang ditangani	90 balita	2.000.000.000
		Persentase bumil KEK					Persentase bumil KEK		
		Persentase cakupan ASI Eksklusif					Persentase cakupan ASI Eksklusif		
		Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi					Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi		
		Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA					Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA		
		Pertemuan Koordinasi Tim Stunting					Pertemuan Koordinasi Tim Stunting		
		Honorarium Tim Stunting Kabupaten					Honorarium Tim Stunting Kabupaten		
		Peringatan Hari Gizi Nasional					Peringatan Hari Gizi Nasional		
		Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak(PMBA) untuk Kader					Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak(PMBA) untuk Kader		
		Pelatihan Emo Demo untuk Kader Posyandu					Pelatihan Emo Demo untuk Kader Posyandu		
		Lomba PMT B2SA di Posyandu					Lomba PMT B2SA di Posyandu		
		Monev Program Gizi					Monev Program Gizi		
		Monev Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA					Monev Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA		
		Monev Tim Stunting					Monev Tim Stunting		
		Pendampingan Ibu Menyusui					Pendampingan Ibu Menyusui		

			Pendampingan Balita Gizi Buruk					Pendampingan Balita Gizi Buruk			
			Pengadaan Susu Tinggi Kalori dan Protein untuk Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk					Pengadaan Susu Tinggi Kalori dan Protein untuk Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk			
			Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis)					Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis)			
			Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan					Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan			
			Pengadaan Sarana Ruang Laktasi					Pengadaan Sarana Ruang Laktasi			
			Pengadaan Leaflet					Pengadaan Leaflet			
			Foto Copy					Foto Copy			
			Cetak Juknis Surveilans Gizi					Cetak Juknis Surveilans Gizi			
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah UKK, Siswa kelas 4-6 SD, orang guru OR/UKS yang dibina	25 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	75.000.000	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah UKK, Siswa kelas 4-6 SD, orang guru OR/UKS yang dibina	25 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	75.000.000	
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		DAM (Depot Air Minum) 90 yg dilatih, pemeriksaan air minum dan air bersih 70 sampel, rumah sehat 72%, pembentukan pos UKK 1	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 74%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAM (Depot Air Minum) 90 yg dilatih, pemeriksaan air minum dan air bersih 70 sampel, rumah sehat 72%, pembentukan pos UKK 1	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 74%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000	
19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Siara Radio, Media cetak, poster, leaflet, cetak banner, media televisi dan kelompok tananan yg mendapatkan penyuluhan	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000	19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Siara Radio, Media cetak, poster, leaflet, cetak banner, media televisi dan kelompok tananan yg mendapatkan penyuluhan	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000	
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah puskesmas yang dibina, jumlah sosialisasi STPT ke hattra, Pengiriman petugas pelatihan akupresure, Pembinaan kader asman toga 27orang,	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang dibina, jumlah sosialisasi STPT ke hattra, Pengiriman petugas pelatihan akupresure, Pembinaan kader asman toga 27orang,	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000	
21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah keg surveilans	240 kali	650.000.000	21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah keg surveilans	240 kali	650.000.000	
			Kegiatan pemeriksaan haji	1 kali				Kegiatan pemeriksaan haji	1 kali		
			Surveilans tata kelola rantai dingin	104 kali				Surveilans tata kelola rantai dingin	104 kali		
			Surveilans suhu vaksin	304 kali				Surveilans suhu vaksin	304 kali		
			Pemantauan rantai dingin	81 kali				Pemantauan rantai dingin	81 kali		
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah pelayanan kesehatan dg mslh kesehatan jiwa	5200 orang	50.000.000	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pelayanan kesehatan dg mslh kesehatan jiwa	5200 orang	50.000.000	

23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000
24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah yang mendapatkan layanan kesehatan khusus			24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah yang mendapatkan layanan kesehatan khusus		
25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Pengelolaan penanganan krisis kesehatan			25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Pengelolaan penanganan krisis kesehatan		
26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Fogging Fokus DBD	250 fokus	400.000.000	26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Fogging Fokus DBD	250 fokus	400.000.000
27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah PBID yang dibiayai, visum	43143, 103 pasien	22.000.000.000	27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah PBID yang dibiayai, visum	43143, 103 pasien	22.000.000.000
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000
28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Kegiatan pengiriman sampel	240 kali	120.000.000	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Kegiatan pengiriman sampel	240 kali	120.000.000
29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan	swastisaba wiwerda	290.000.000	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan	swastisaba wiwerda	290.000.000
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan						Pengelolaan Penelitian Kesehatan				
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
30	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	56.000 pasien	1.080.000.000	30	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	56.000 pasien	1.080.000.000
			BOK Pusk	27 puskesmas	20.478.613.000				BOK Pusk	27 puskesmas	20.478.613.000
			BOK Dinkes	12 bulan	1.200.000.000				BOK Dinkes	12 bulan	1.200.000.000
31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000	31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000
			Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan	1.350.000.000				Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan	1.350.000.000
32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Pam Lebaran, 20 re akred, 10 klinik	600.000.000	32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Pam Lebaran, 20 re akred, 10 klinik	600.000.000
					1.160.000.000						1.160.000.000

33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah imunisasi dasar lengkap	17.957	700.000.000	33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah imunisasi dasar lengkap	17.957	700.000.000
34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah keg kewasoodaan dini dan respon wabah	12 keg	1.500.000.000	34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah keg kewasoodaan dini dan respon wabah	12 keg	1.500.000.000
35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Peningatan Sarana dan Prasaranan sistem penanganan Gawat darurat	1 paket	1.500.000.000	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Peningatan Sarana dan Prasaranan sistem penanganan Gawat darurat	1 paket	1.500.000.000
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>		<b>Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik</b>	<b>5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)</b>	<b>180.000.000</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>		<b>Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik</b>	<b>5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)</b>	<b>180.000.000</b>
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Data dan informasi yang dikelola	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Data dan informasi yang dikelola	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah pengadaan alat/perangkat SIK dan jaringan internet	0	-	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah pengadaan alat/perangkat SIK dan jaringan internet	0	-
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya</b>	<b>2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawaddah Medika,</b>	<b>250.000.000</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya</b>	<b>2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawaddah Medika,</b>	<b>250.000.000</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Pengendalian Izin Operasional 11 Rumah Sakit	2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawaddah Medika,	50.000.000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Pengendalian Izin Operasional 11 Rumah Sakit	2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawaddah Medika,	50.000.000
2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tatakelola 11 pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kemenkes	11 RS	50.000.000	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tatakelola 11 pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kemenkes	11 RS	50.000.000
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Mutu pelayanan di 11 Rumah Sakit sesuai standar Kemenkes	11 RS	100.000.000	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Mutu pelayanan di 11 Rumah Sakit sesuai standar Kemenkes	11 RS	100.000.000
4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		adanya Dokumen perumusan pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dok	50.000.000	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		adanya Dokumen perumusan pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dok	50.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehtan sesuai standar</b>	<b>85%</b>	<b>3.050.000.000</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehtan sesuai standar</b>	<b>85%</b>	<b>3.050.000.000</b>

	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		<b>Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)</b>	<b>1225</b>	<b>150.000.000</b>		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		<b>Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)</b>	<b>1225</b>	<b>150.000.000</b>
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya	1225	150.000.000		2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya	1225	150.000.000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		<b>Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada</b>	<b>33,211,2</b>	<b>2.900.000.000</b>			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada</b>	<b>33,211,2</b>	<b>2.900.000.000</b>
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah nakes yg direkrut	33	900.000.000		2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah nakes yg direkrut	33	900.000.000
			Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang	211,2	2.000.000.000				Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang	211,2	2.000.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<b>Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM</b>					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM</b>		
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	-		1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	-
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan</b>		550.000.000		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan</b>		550.000.000
			<b>Apotik (96 apotik)</b>	<b>60%</b>					<b>Apotik (96 apotik)</b>	<b>60%</b>	
			<b>Toko Obat (2 toko obat)</b>	<b>100%</b>					<b>Toko Obat (2 toko obat)</b>	<b>100%</b>	
			<b>Umot (1 umot)</b>	<b>100%</b>					<b>Umot (1 umot)</b>	<b>100%</b>	
			<b>PIRT (1900)</b>	<b>1660(87%)</b>					<b>PIRT (1900)</b>	<b>1660(87%)</b>	
			<b>Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan</b>	<b>20%</b>					<b>Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan</b>	<b>20%</b>	

	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		<b>jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional</b>	<b>15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT</b>	<b>130.000.000</b>		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<b>jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional</b>	<b>15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT</b>	<b>130.000.000</b>	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotik, toko obat, toko alkes yg diawasi 20	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alkes yg diawasi 20	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah data perijinan yang disediakan 20 apotik	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah data perijinan yang disediakan 20 apotik	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	
3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah pembinaan apotik	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pembinaan apotik	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		<b>Jumlah sertifikat produksiutk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1</b>	<b>3</b>	<b>55.000.000</b>		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	<b>Jumlah sertifikat produksiutk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1</b>	<b>3</b>	<b>55.000.000</b>	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah pengendalian dan pengawasan	3 PKRT	55.000.000	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah pengendalian dan pengawasan	3 PKRT	55.000.000	

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan	120	175.000.000		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan	120	175.000.000	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat yg dikeluarkan	120	175.000.000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat yg dikeluarkan	120	175.000.000	
	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan	70 sertifikat	60.000.000		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan</b>	<b>70 sertifikat</b>	<b>60.000.000</b>	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah jasa boga yang diawasi	70 jasa boga	60.000.000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah jasa boga yang diawasi	70 jasa boga	60.000.000	
	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>20 sekolah</b>	<b>50.000.000</b>		<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>20 sekolah</b>	<b>50.000.000</b>	
1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				
2	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah yang diawasi 20 sekolah	20 sekolah	50.000.000	2	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah yang diawasi 20 sekolah	20 sekolah	50.000.000	
	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan</b>	<b>120 kali</b>	<b>80.000.000</b>		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan</b>	<b>120 kali</b>	<b>80.000.000</b>	

1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah pemeriksaan post market 120	120 kali	40.000.000	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah pemeriksaan post market 120	120 kali	40.000.000
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		Jumlah pengawasan 120	120 kali	40.000.000	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		Jumlah pengawasan 120	120 kali	40.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>Persentase Rumah Tangga BerPHBS</b>	<b>74</b>	<b>850.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>Persentase Rumah Tangga BerPHBS</b>	<b>74</b>	<b>850.000.000</b>
			<b>Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif</b>	<b>83,9</b>					<b>Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif</b>	<b>83,9</b>	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan	5 keg	250.000.000		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan	5 keg	250.000.000
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan Nasional	1 keg	250.000.000	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan Nasional	1 keg	250.000.000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya	6 posyandu	400.000.000		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya	6 posyandu	400.000.000
			Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 desa siaga					Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 desa siaga	
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>300.265.780.403</b>						<b>300.265.780.403</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat atau biasa disebut melalui *bottom up* dilakukan bersamaan dengan jadwal musrenbang di Kecamatan, yang dimulai dari tingkat Desa dan Kecamatan. Selain usulan dari Musrenbangcam, juga dilakukan telaah usulan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Sesuai dengan tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5**

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA  
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 (TC.32)  
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DAFTAR USULAN LANGSUNG					
		NIHIL			
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD					
		NIHIL			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kebijakan Nasional diatas sudah diakomodir pada rancangan awal Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021.

#### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang mudah dan murah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan

sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu	AHH	72,73	72,83	72,93	73,03	73,13
			IKM	79,46	80,46	81,46	82,46	83,46
			AKI	114	113	112	111	110

			AKB	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
			Persentase Stunting	23%	21%	19%	17%	15%
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	18% (5 Puskesmas)	37% (10 Puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	100% (27 Puskesmas)
			Persentase Desa KLB	64% (194 desa)	56% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	31% (94 desa)
			Persentase ODF (desa ODF)	60,50%	70,50%	80,50%	90,50%	100%
			Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiwerda	swastisaba wiwerda	swastisaba wistara
			Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	65,5% dan 6,6%
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	100% (12 Indikator)
			Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90	90	91	92	93
			Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90	90	91	92	93
			Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	90%
			Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan					
			- Apotik (96 apotik)	30%	45%	60%	75%	100%
			- Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%	100%	100%	100%
			- Umot (1 umot)	100%	100%	100%	100%	100%
			- PIRT (1900)	1420 (74%)	1540 (81%)	1660(87%)	1780 (93%)	1900(100%)
			Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%	20%	20%	20%	20%
			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	72%	73%	74%	75%	76%
			Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	85,90%
			Nilai RB	84,77	85,17	85,57	85,97	86,37

			Nilai Sakip	84,77	85,17	85,57	85,97	86,37
--	--	--	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah 5 program, yaitu:

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat  
Sub Kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan :
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD  
Sub Kegiatan :
  - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

## **2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
  - Pembangunan Puskesmas
  - Pengembangan Rumah Sakit
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  - Pengadaan Obat, Vaksin
  - Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
  - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
  - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
  - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
  - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
  - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
  - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
  - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
  - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
  - Operasional Pelayanan Puskesmas
  - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
  - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
  - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
  - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi  
Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
  - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
  - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
  - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

### **3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

#### **4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

- 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- 5) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

- 6) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

## **5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Berikut gambaran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana sesuai dengan Tabel 3.2. :

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN MOJOKERTO (TC. 33)

DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
00	0	00	00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>			<b>175.715.993.653</b>			<b>86,37 (A)</b>	<b>172.784.856.000</b>
00	0	00	00	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik		84%	27.500.000			86%	25.000.000
01	0	00	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000	APBD			7.500.000
01	2	01	00		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes		3 dok (Renja, Renstra, perubahan renstra)	10.000.000			1 dok (Renja)	7.500.000
01	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun		2 dok	0			2 dok	0
01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun		1 dok	0			1 dok	0
01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA		4 kali	10.000.000	APBD		4 kali	10.000.000
01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA		4 kali	0			4 kali	0
01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah keg koordinasi penyusunan lap kinerja		6 kali	0			6 kali	
01	2	01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok evaluasi yang disusun			7.500.000	APBD			7.500.000
01	2	01	07		Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)		7 dok	7.500.000			7 dok	7.500.000
01	2	02	00	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD Daerah		90%	124.565.493.653			91%	116.033.856.000
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan			124.565.493.653	APBD			100.714.046.000
					Dinkes		14 dok SPM	70.714.046.000			14 dok SPM	70.714.046.000
					Insentif		1 paket	39.924.347.653				30.000.000.000
					BOP Dinkes dan Pusk		12 bulan	13.927.100.000			27 pusk, 12 bulan	15.319.810.000

01	2	03	00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	30.000.000			12 keg	35.000.000
01	2	03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	30.000.000	APBD		12 keg	35.000.000
01	2	05	00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	74	40.000.000			76	40.000.000
01	2	05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring pegawai	12 keg	15.000.000	APBD		12 keg	15.000.000
01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	25.000.000	APBD		1 kegiatan	25.000.000
01	2	06	00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	498.000.000			91%	498.000.000
01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi yang diadakan	1 paket	5.000.000	APBD		1 paket	5.000.000
01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 paket	25.000.000	APBD		1 paket	25.000.000
01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yg diadakan	1 paket	54.000.000	APBD		1 paket	54.000.000
01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	1 paket	38.000.000	APBD		1 paket	38.000.000
01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan buku perundang-undangan yang diadakan	1 paket	3.000.000	APBD		1 paket	3.000.000
01	2	06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diadakan	1 paket	66.000.000	APBD		1 paket	66.000.000
01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang diadakan	1 paket	7.000.000	APBD		1 paket	7.000.000
01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	200.000.000
01	2	06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
				6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional		-				-
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan	0	-	APBD		0	-
01	2	08	00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	90%	275.000.000			91%	275.000.000
01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	250.000.000	APBD		12 bulan	250.000.000
01	2	08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	1 paket	25.000.000	APBD		1 paket	25.000.000
01	2	09	00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik	90%	300.000.000			91%	300.000.000

01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara		15 unit	100.000.000	APBD		15 unit	100.000.000
01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab		2 gedung	200.000.000	APBD		2 gedung	200.000.000
01	2	10	00	9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%		92%	49.980.000.000			93%	55.578.000.000
01	2	10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran blud			49.980.000.000	FKTP			55.578.000.000
<b>02</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>AKI</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>112/100.000 KH</b>	<b>120.099.786.750</b>			<b>111/100.000 KH</b>	<b>124.537.211.889</b>
						<b>AKB</b>		<b>4,3/1.000 KH</b>				<b>4,2/1.000 KH</b>	
						<b>Persentase Stunting</b>		<b>19%</b>				<b>17%</b>	
						<b>Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna</b>		<b>51% (15 Pusk)</b>				<b>75% (20 Pusk, 2 RD)</b>	
						<b>Persentase KLB yang ditangani</b>		<b>47% (144 desa)</b>				<b>39% (119 desa)</b>	
						<b>Persentase ODF</b>		<b>90%</b>				<b>100%</b>	
						<b>Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)</b>		<b>swastisaba wiwerda</b>				<b>swastisaba wiwerda</b>	
						<b>Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap</b>		<b>63,5% dan 6,4%</b>				<b>64,5% dan 6,5%</b>	
						<b>Persentase Indikator SPM yang mencapai target</b>		<b>84% (10indikator)</b>				<b>91% (11 Indikator)</b>	
						<b>Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar</b>		<b>91%</b>				<b>92%</b>	
						<b>Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar</b>		<b>91%</b>				<b>92%</b>	
02	2	01	00	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				50.802.793.750				54.046.380.889
						Jumlah gedung puskesmas yang direhab		5 puskesmas				6 puskesmas	
						Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik		10 gedung pustu				10 gedung pustu	
						Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)		26 sarana				26 sarana	
						Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2 set					

						Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		8 paket				8 paket	
						Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin		11 paket				11 paket	
						Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai		7 paket				7 paket	
						Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		7 paket				7 paket	
				2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun		1 puskesmas	13.666.815.000	DID, DBHCHT		2 puskesmas	15.388.343.806
02	2	01	09	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipelihara		5 puskesmas	11.505.000.000	DID, DBHCHT		6 puskesmas	12.655.500.000
02	2	01	10	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang dipelihara		10 pustu	6.500.000.000	DID, DBHCHT		10 pustu	6.500.000.000
02	2	01	13	5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dok DPLH (UKL, UPL), SPPL (Surat pengelolaan Lingkungan)		7 DPHL, 6 SPPL	300.000.000	APBD		3 DPHL, 6 SPPL	300.000.000
02	2	01	14	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)		1 paket	10.500.000.000	DAK FISIK		1 paket	10.500.000.000
02	2	01	15	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alkes di 27 puskesmas yang di kalibrasi		1 paket	170.000.000	APBD		1 paket	180.000.000
02	2	01	16	8	Pengadaan Obat, Vaksin				4.827.951.000	APBD, DBHCHT, DAK			4.907.518.500
						Jumlah obat yang diadakan		1 paket	2.000.000.000			1 paket	2.000.000.000
						Jumlah obat yang diadakan		1 paket	2.652.250.000			1 paket	2.731.817.500
						Distribusi e logistik		12 keg	55.701.000			12 keg	55.701.000
						Penunjang DAK		12 keg	120.000.000			12 keg	120.000.000
02	2	01	17	9	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes		1 paket	2.733.027.750	APBD, DBHCHT, DAK		1 paket	2.815.018.583
02	2	01	19	10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL yang dipelihara		7	600.000.000	APBD		10	800.000.000
02	2	02	00		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target</b>		<b>30 layanan</b>	<b>68.866.993.000</b>			<b>0 layanan</b>	<b>70.060.831.000</b>

02	2	02	01	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan, monitoring evaluasi program 6 kali, orientasi pemantapan program ke nakes dan masyarakat 3 kali, audit parinatal 4 kali, pelacakan kasus pusk dan RS 25 kali, supervisi fasilitatif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaan aplikasi P4K		18.550	366.630.000	APBD		#VALUE!	403.293.000
02	2	02	02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil bersalin		17.658	4.840.000.000	APBD, DAK NON FISIK		#VALUE!	5.324.000.000
02	2	02	03	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, orotensi bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali		17.002	242.000.000	APBD		#VALUE!	266.200.000
02	2	02	04	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah keg monitoring keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali		66.852	151.250.000	APBD		#VALUE!	166.375.000
02	2	02	05	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi		40.400	363.000.000	APBD		#VALUE!	399.300.000
02	2	02	06	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan		107.100	60.500.000	APBD		#VALUE!	66.550.000
02	2	02	07	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)		153.000	363.000.000	APBD		#VALUE!	399.300.000
02	2	02	08	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		81.776	181.500.000	APBD		#VALUE!	199.650.000
02	2	02	09	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan		48.700	181.500.000	APBD		#VALUE!	199.650.000
02	2	02	10	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan		2.511	181.500.000	APBD		#VALUE!	199.650.000

02	2	02	11	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah suspek TB yang diperiksa	2.913	363.000.000	APBD	#VALUE!	399.300.000
02	2	02	12	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah suspek/resiko HIV yang diperiksa	13.002	544.500.000	APBD	#VALUE!	598.950.000
						ketersediaan operasional Hibah KPA	12 bulan	200.000.000	APBD	12 bulan	200.000.000
				13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Pendudukan pada Kondisi KLB		1.500.000.000	APBD		1.500.000.000
				14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000	APBD		1.500.000.000
02	2	02	15	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah gizi buruk yang ditangani	90 balita	2.000.000.000	APBD	85 balita	2.000.000.000
						Persentase bumil KEK					
						Persentase cakupan ASI Eksklusif					
						Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi					
						Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA					
						Pertemuan Koordinasi Tim Stunting					
						Honorarium Tim Stunting Kabupaten					
						Peringatan Hari Gizi Nasional					
						Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak(PMBA) untuk Kader					
						Pelatihan Emo Demo untuk Kader Posyandu					
						Lomba PMT B2SA di Posyandu					
						Monev Program Gizi					
						Monev Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA					
						Monev Tim Stunting					
						Pendampingan Ibu Menyusui					
						Pendampingan Balita Gizi Buruk					
						Pengadaan Susu Tinggi Kalori dan Protein untuk Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk					
						Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis)					
						Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan					



					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000	APBD		54 sekolah,10 pondok	50.000.000
02	2	02	28	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Kegiatan pengiriman sampel	240 kali	120.000.000	APBD, DAK NON FISIK		240 kali	120.000.000
02	2	02	29	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan	swastisaba wiwerda	290.000.000	APBD		swastisaba wiwerda	295.000.000
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan							
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit							
02	2	02	33	30	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	56.000 pasien	1.080.000.000	APBD, DAK NON FISIK		56.000 pasien	1.080.000.000
						BOK Pusk	27 puskesmas	20.478.613.000			27 puskesmas	20.478.613.000
						BOK Dinkes	12 bulan	1.200.000.000			12 bulan	1.200.000.000
02	2	02	34	31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000	APBD		1 paket, 12 bulan	1.000.000.000
						Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan	1.350.000.000	APBD		12 bulan	1.350.000.000
02	2	02	35	32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Pam lebaran, 20 re akred, 10 klinik	600.000.000	APBD		27 puskesmas PKP, 2 Pam lebaran, 6 re akred, 10 klinik	500.000.000
								1.160.000.000	DAK NON FISIK			1.160.000.000
02	2	02	36	33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah imunisasi dasar lengkap	17.957	700.000.000	APBD, DAK NON FISIK		#VALUE!	700.000.000
02	2	02	37	34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah keg kewaspadaan dini dan respon wabah	12 keg	1.500.000.000	APBD, DAK NON FISIK		12 keg	500.000.000
02	2	02	38	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Peningkatan Sarana dan Prasarana sistem penanganan Gawat darurat	1 paket	1.500.000.000	APBD, DAK NON FISIK, DID		1 paket	1.000.000.000
02	2	03	00		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik</b>	<b>5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)</b>	<b>180.000.000</b>			<b>5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)</b>	<b>180.000.000</b>

02	2	03	01	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Data dan informasi yang dikelola		5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000	APBD		5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000
02	2	03	02	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola		4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000	APBD		4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000
02	2	03	03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan alat/perangkat SIK dan jaringan internet		0	-			0	-
02	2	04	00		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya</b>		<b>2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawaddah Medika,</b>	<b>250.000.000</b>			<b>1 RS (RS Sidowaras)</b>	<b>250.000.000</b>
02	2	04	01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pengendalian Izin Operasional 11 Rumah Sakit		2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawaddah Medika,	50.000.000	APBD		1 RS (RS Sidowaras)	50.000.000
02	2	04	02	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tatakelola 11 pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kementerian		11 RS	50.000.000	APBD		11 RS	50.000.000
02	2	04	03	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Mutu pelayanan di 11 Rumah Sakit sesuai standar Kementerian		11 RS	100.000.000	APBD		11 RS	100.000.000
02	2	04	04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	adanya Dokumen perumusan pelayanan Kesehatan Rujukan		2 dok	50.000.000	APBD		2 dok	50.000.000
<b>03</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>0</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>85%</b>	<b>3.050.000.000</b>			<b>90%</b>	<b>3.050.000.000</b>
03	2	01	00		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)</b>		<b>1225</b>	<b>150.000.000</b>			<b>1250</b>	<b>150.000.000</b>
03	2	01	01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
03	2	01	02	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya		1225	150.000.000	APBD		1250	150.000.000
03	2	02	00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada</b>		<b>33,211,2</b>	<b>2.900.000.000</b>			<b>33,211,2</b>	<b>2.900.000.000</b>
				1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
03	2	02	02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah nakes yg direkrut		33	900.000.000	APBD		33	900.000.000

						Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang		211,2	2.000.000.000	DANA BK, APBD		211,2	2.000.000.000
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
03	2	03	00			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM</b>						
03	2	03	01	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	-			0	-
<b>04</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>		550.000.000			550.000.000
							<b>Apotik (96 apotik)</b>		<b>60%</b>			<b>75%</b>	
							<b>Toko Obat (2 toko obat)</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>	
							<b>Umot (1 umot)</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>	
							<b>PIRT (1900)</b>		<b>1660(87%)</b>			<b>1780 (93%)</b>	
							<b>Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan</b>		<b>20%</b>			<b>20%</b>	
04	2	01	00			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional		<b>15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT</b>	<b>130.000.000</b>		<b>15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT</b>	<b>130.000.000</b>
04	2	01	01	1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alkes yg diawasi 20		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	APBD	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000
04	2	01	02	2		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah data perizinan yang disediakan 20 apotik		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	APBD	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000
04	2	01	03	3		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pembinaan apotik		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	APBD	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000

04	2	02	00		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	<b>Jumlah sertifikat produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1</b>		<b>3</b>	<b>55.000.000</b>			<b>3</b>	<b>55.000.000</b>
04	2	02	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
04	2	02	02	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah pengendalian dan pengawasan		3 PKRT	55.000.000	APBD		3 PKRT	55.000.000
04	2	03	00		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<b>Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan</b>		<b>120</b>	<b>175.000.000</b>			<b>120</b>	<b>175.000.000</b>
04	2	03	01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat yg dikeluarkan		120	175.000.000	APBD		120	175.000.000
04	2	04	00		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan</b>		<b>70 sertifikat</b>	<b>60.000.000</b>			<b>70 sertifikat</b>	<b>60.000.000</b>
04	2	04	01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah jasa boga yang diawasi		70 jasa boga	60.000.000	APBD		70 jasa boga	60.000.000
04	2	05	00		<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>		<b>20 sekolah</b>	<b>50.000.000</b>			<b>20 sekolah</b>	<b>50.000.000</b>
04	2	05	01	1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								

					Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah yang diawasi 20 sekolah		20 sekolah	50.000.000	APBD		20 sekolah	50.000.000
04	2	06	00		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan</b>		<b>120 kali</b>	<b>80.000.000</b>			<b>120 kali</b>	<b>80.000.000</b>
04	2	06	01	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan post market 120		120 kali	40.000.000	APBD		120 kali	40.000.000
04	2	06	02	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah pengawasan 120		120 kali	40.000.000	APBD		120 kali	40.000.000
<b>05</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Rumah Tangga BerPHBS</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>74</b>	<b>850.000.000</b>			<b>75</b>	<b>850.000.000</b>
						<b>Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif</b>		<b>83,9</b>				<b>84,9</b>	
05	2	01	00		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan		5 keg	250.000.000			5 keg	250.000.000
05	2	01	01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan Nasional Masyarakat		1 keg	250.000.000	APBD		1 keg	250.000.000
05	2	02	00		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan		5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000			5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000
05	2	02	01	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga		5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	APBD		5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000
05	2	03	00		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya		6 posyandu	400.000.000			6 posyandu	400.000.000
						Jumlah Desa Siaga yang dibina		6 desa siaga				6 desa siaga	
05	2	03	00	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000	APBD, DAK NON FISIK		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH :  
DINAS KESEHATAN

No	Kode				Program/Kegiatan	UP	B/L	Indikator Kinerja			Lokasi	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		KL	USULAN APBN	
								Output	Outcome	Target			SKPD Terkait	Pagu (Rp)		Rp	D/TB/DAK
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	00	0	00	00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>175.715.993.653</b>					
	00	0	00	00	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik		84%		27.500.000					
	01	0	00	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10.000.000					
	01	2	01	00				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes		3 dok (Renja, Renstra, perubahan renstra)		10.000.000					
	01	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun		2 dok		0					
	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun		1 dok		0					
	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA		4 kali		10.000.000					
	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA		4 kali		0					
	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah keg koordinasi penyusunan lap kinerja		6 kali		0					
	01	2	01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dok evaluasi yang disusun				7.500.000					
	01	2	01	07				Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)		7 dok		7.500.000					
	01	2	02	00	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran PD		90%		124.565.493.653					



01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket		200.000.000				
01	2	06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket		100.000.000				
				6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional			-				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan	0		-				
01	2	08	00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	90%		275.000.000				
01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		250.000.000				
01	2	08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket		25.000.000				
01	2	09	00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik	90%		300.000.000				
01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 unit		100.000.000				
01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang direhab	2 gedung		200.000.000				
01	2	10	00	9	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%	92%		49.980.000.000				
01	2	10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Persentase realisasi anggaran blud			49.980.000.000				
02	0	00	00		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>AKI</b>		<b>112/100.000 KH</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>23.516.331.000</b>			



02	2	01	09	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dipelihara	5 puskesmas	-		11.505.000.000
02	2	01	10	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Pustu yang dipelihara	10 pustu	-		6.500.000.000
02	2	01	13	5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah dok DPLH (UKL, UPL), SPPL (Surat pengelolaan Lingkungan)	7 DPHL, 6 SPPL	300.000.000		
02	2	01	14	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)	1 paket	-		10.500.000.000
02	2	01	15	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah alkes di 27 puskesmas yang di kalibrasi	1 paket	170.000.000		
02	2	01	16	8	Pengadaan Obat, Vaksin				2.827.951.000		
							Jumlah obat yang diadakan	1 paket	-		2.000.000.000
							Jumlah obat yang diadakan	1 paket	2.652.250.000		
							Distribusi e logistik	12 keg	55.701.000		
							Penunjang DAK	12 keg	120.000.000		
02	2	01	17	9	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes	1 paket	-		2.733.027.750
02	2	01	19	10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah IPAL yang dipelihara	7	600.000.000		
02	2	02	00		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target</b>	<b>30 layanan</b>	<b>19.188.380.000</b>		

02	2	02	01	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan, monitoring evaluasi program 6 kali, orientasi pemantapan program ke nakes dan masyarakat 3 kali, audit parinatal 4 kali, pelacakan kasus pusk dan RS 25 kali, supervisi fasilitatif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaan aplikasi P4K	18.550		366.630.000				
02	2	02	02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah ibu hamil bersalin	17.658		-			4.840.000.000	
02	2	02	03	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, ororentasi bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali	17.002		242.000.000				
02	2	02	04	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah keg monitoring keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali	66.852		151.250.000				
02	2	02	05	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi	40.400		363.000.000				
02	2	02	06	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan	107.100		60.500.000				
02	2	02	07	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)	153.000		363.000.000				
02	2	02	08	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	81.776		181.500.000				
02	2	02	09	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan	48.700		181.500.000				

02	2	02	10	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan	2.511		181.500.000				
02	2	02	11	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah suspek TB yang diperiksa	2.913		363.000.000				
02	2	02	12	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah suspek/resiko HIV yang diperiksa	13.002		544.500.000				
							ketersediaan operasional Hibah KPA	12 bulan		200.000.000				
				1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Pendudukan pada Kondisi KLB			1.500.000.000				
				1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan			1.500.000.000				
02	2	02	15	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah gizi buruk yang ditangani	90 balita		2.000.000.000				
							Persentase bumil KEK							
							Persentase cakupan ASI Eksklusif							
							Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi							
							Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA							
							Pertemuan Koordinasi Tim Stunting							
							Honorarium Tim Stunting Kabupaten							
							Peringatan Hari Gizi Nasional							
							Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak(PMBA) untuk Kader							
							Pelatihan Emo Demo untuk Kader Posyandu							
							Lomba PMT B2SA di Posyandu							
							Monev Program Gizi							



02	2	02	20	21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah keg surveilens	240 kali	650.000.000				
							Kegiatan pemeriksaan haji	1 kali					
							Surveilens tata kelola rantai dingin	104 kali					
							Surveilens suhu vaksin	304 kali					
							Pemantauan rantai dingin	81 kali					
02	2	02	21	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah pelayanan kesehatan dg mslh kesehatan jiwa	5200 orang	50.000.000				
02	2	02	22	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000				
				24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah yang mendapatkan layanan kesehatan khusus						
				25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Pengelolaan penanganan krisis kesehatan						
02	2	02	25	26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Fogging Fokus DBD	250 fokus	400.000.000				
02	2	02	26	27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah PBID yang dibiayai, visum	43143, 103 pasien	-			22.000.000.000	
					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000				
02	2	02	28	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Kegiatan pengiriman sampel	240 kali	120.000.000				
02	2	02	29	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan	swastisaba wiwerda	290.000.000				
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan								
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit								

02	2	02	33	3 0	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	56.000 pasien	1.080.000.000				
							BOK Pusk	27 puskesmas	-			20.478.613.000	
							BOK Dinkes	12 bulan	-			1.200.000.000	
02	2	02	34	3 1	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000				
							Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan	1.350.000.000				
02	2	02	35	3 2	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Pam lebaran, 20 re akred, 10 klinik	600.000.000				
									-			1.160.000.000	
02	2	02	36	3 3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah imunisasi dasar lengkap	17.957	700.000.000				
02	2	02	37	3 4	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah keg kewaspadaan dini dan respon wabah	12 keg	1.500.000.000				
02	2	02	38	3 5	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Peningkatan Sarana dan Prasarana sistem penanganan Gawat darurat	1 paket	1.500.000.000				
02	2	03	00		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>		<b>Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik</b>	<b>5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)</b>	<b>180.000.000</b>				
02	2	03	01	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Data dan informasi yang dikelola	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil	75.000.000				



03	2	01	00		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			<b>Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)</b>		1225		150.000.000				
03	2	01	01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											
03	2	01	02	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya		1225		150.000.000				
03	2	02	00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			<b>Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada</b>		33,211,2		900.000.000				
				1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
03	2	02	02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Jumlah nakes yg direkrut		33		900.000.000				
								Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang		211,2		-		2.000.000.000		
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
03	2	03	00		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			<b>Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM</b>								

	03	2	03	01	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0								
	04	0	00	00		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			<b>Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan</b>			<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>550.000.000</b>					
								<b>Apotik (96 apotik)</b>		<b>60%</b>								
								<b>Toko Obat (2 toko obat)</b>		<b>100%</b>								
								<b>Umot (1 umot)</b>		<b>100%</b>								
								<b>PIRT (1900)</b>		<b>1660(87%)</b>								
								<b>Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan</b>		<b>20%</b>								
	04	2	01	00		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional		<b>15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT</b>			<b>130.000.000</b>					
	04	2	01	01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotik, toko obat, toko alkes yg diawasi 20		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT			50.000.000					
	04	2	01	02	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah data perijinan yang disediakan 20 apotik		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT			40.000.000					

04	2	01	03	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Jumlah pembinaan apotik		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT		40.000.000				
04	2	02	00		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			<b>Jumlah sertifikat produksi utk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1</b>		<b>3</b>		<b>55.000.000</b>				
04	2	02	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga											
04	2	02	02	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			Jumlah pengendalian dan pengawasan		3 PKRT		55.000.000				
04	2	03	00		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			<b>Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan</b>		<b>120</b>		<b>175.000.000</b>				

04	2	03	01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah sertifikat yg dikeluarkan		120		175.000.000				
04	2	04	00		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>		<b>Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan</b>		<b>70 sertifikat</b>		<b>60.000.000</b>				
04	2	04	01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah jasa boga yang diawasi		70 jasa boga		60.000.000				
04	2	05	00		<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>		<b>Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>		<b>20 sekolah</b>		<b>50.000.000</b>				
04	2	05	01	1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										

						Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah yang diawasi 20 sekolah		20 sekolah		50.000.000				
	04	2	06	00		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>		<b>Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan</b>		<b>120 kali</b>		<b>80.000.000</b>				
	04	2	06	01	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah pemeriksaan post market 120		120 kali		40.000.000				
	04	2	06	02	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		Jumlah pengawasan 120		120 kali		40.000.000				
	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>Persentase Rumah Tangga BerPHBS</b>		<b>74</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Puskesmas</b>	<b>650.000.000</b>				
							<b>Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif</b>		<b>83,9</b>							
	05	2	01	00		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan		5 keg		250.000.000				

05	2	01	01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan Nasional	1 keg		250.000.000					
05	2	02	00		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa		200.000.000					
05	2	02	01	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa		200.000.000					
05	2	03	00		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya	6 posyandu		200.000.000					
							Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 desa siaga							
05	2	03	00	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas		200.000.000			200.000.000		
										<b>201.482.324.653</b>		<b>2.000.000.000</b>		<b>96.783.455.750</b>	<b>300.265.780.403</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Ranwal Renja PD ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mojokerto.

Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan menerapkan mekanisme perencanaan **bottom up planning** dan **top down policy**. Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Ranwal Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan hasil dari usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Bidang yang disinkronkan dan diselaraskan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maupun dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijakan Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu dukungan dana dari semua pihak baik dari pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto di tahun-tahun mendatang akan diusahakan dengan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan. Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Kesehatan secara luas.

**Mojokerto, Januari 2023**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**



**dr. ULUM ROKHMAT R, MH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 197411132006041008**



